CORRUPTION

Ilmu Sosial

Laporan
Hibah Penelitian Hibah Bersaing
Tahun Anggaran 2010

KK-2
KKB
UP-113/11
Pry
K

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Korupsi Dalam Model Kapitalisme Kaum Peranakan: Analisis Strukturasi Terhadap Kendala Kultural Gerakan Sosial Anti-Korupsi di Kalangan Pengusaha Cina

Edy Herry Pryhantoro
Novri Susan

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Nomor: 553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

Universitas Airlangga
2010

HALAMAN PENGESAHAN

1.JUDUL : Korupsi Dalam Model Kapitalisme Kaum Peranakan: Analisis Strukturasi Terhadap Kendala Kultural Gerakan Sosial Anti-Korupsi di Kalangan Pengusaha Cina

2.Ketua Peneliti

a.Nama lengkap : Drs. Edy Herry Pryhantoro, MSi.
b.Jenis Kelamin : Laki-laki
c.NIP : 196403131991111001
d.Pangkat/Golongan : Penata/III d
e.Jabatan Fungsional : Lektor
f.Bidang Keahlian : Sosiologi Korupsi
g.Fakultas/Jurusan/Puslit : FISIP/Sosiologi
h.Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tim Peneliti

NO.	NAMA PENELITI	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS / JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
01	Drs. Edy Herry Pryhantoro, MSi.	Sosiologi Korupsi	FISIP/Sosiologi	Universitas Airlangga
02	Novri Susan, SSos., MA.	Analisis Sosial	FISIP/Sosiologi	Universitas Airlangga

3.Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

a.Jangka waktu yang diusulkan : 3 tahun
b.Biaya yang diusulkan : Rp. 50.000.000
c.Biaya yang disetujui tahun 2010 : Rp. 22.000.000

Surabaya, 10 Oktober 2010
Ketua Peneliti,

Drs. Edy Herry Pryhantoro, MSi.
NIP. 196403131991111001

Mengetahui
Wakil Dekan I FISIP- Unair

Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., MA
NIP. 196109271988102001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt.,M.Si
NIP. 195908051987011001

RINGKASAN

KORUPSI DALAM MODEL KAPITALISME KAUM PERANAKAN: Analisis Strukturasi Terhadap Kendala Kultural Gerakan Sosial Anti Korupsi di Kalangan Pengusaha Cina. (Edy Herry Pryhantoro, 2010)

Penelitian ini hendak melihat linkage agen-struktur yang mempengaruhi praktik-praktik korupsi di kalangan kaum peranakan atau Cina perantauan yang telah berdomisili di Indonesia. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa selama ini terdapat beberapa persepsi yang salah dalam menganalisis terjadinya fenomena korupsi di Indonesia sehingga dalam pemberantasannya terlihat terkendala oleh berbagai faktor struktural maupun kultural. Persepsi salah tersebut menyangkut obyek yang dikaji, metodologi pemberantasan korupsi yang dipakai dan teori sosiologi yang dijadikan pendekatannya.

Pada tahap pertama penelitian dilakukan analisis wacana terhadap status masalah yang hendak dikaji, sedangkan pada tahap kedua akan dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Dengan demikian keseluruhan proses penelitian ini dalam kedua tahapnya akan berlangsung berturut-turut analisis terhadap wacana sosial dan penelitian lapangan menyangkut korupsi, kapitalisme dan model kapitalisme yang manifes di Indonesia, kaum Cina peranakan dan hubungan antara berbagai aspek tersebut dengan melihat lingkage agen-struktur. Metode kualitatif yang dilakukan dalam keseluruhan proses penelitian ini menggunakan pendekatan interaksionisme-simbolik, sementara analisis yang dilakukan menggunakan perspektif strukturasi. Hasil pembahasan akan ditulis dengan gaya deskriptif argumentatif sebagai bentuk pembacaan secara kritis terhadap fenomena korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa praktik-praktik korupsi yang terjadi disebabkan oleh *embededness* kepentingan ekonomi yang didasari oleh etos kerja yang sangat bias kultur Cina, yakni etika bisnis Cina, strategi perang yang cenderung menghalalkan segala cara yang diterapkan sebagai strategi demi akumulasi modal, dan berbagai sistem nilai kultural seperti prinsip *'guang shi'*. Pada gilirannya agensi (pengusaha Cina berikut etos kulturalnya) bertaut-berkelindan dengan struktur (sistem politik dan ekonomi keindonesian) sehingga mewujudkan kapitalisme perkoncoan, yang pada gilirannya dalam rangka upaya pemberantasan korupsi menjadi kendala kultural yang menjadi faktor menentukan bagi berhasil-tidaknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Kata Kunci: *agen-struktur, Cina perantauan, kapitalisme perkoncoan)*

SUMMARY

This research will see agency-structural linkages which influencing some practice in Chinese community or Chinese abroad which have domiciliation in Indonesia. Assumption that constituting this research during the time there are some wrong perception in analyzing the happening of corruption phenomenon in Indonesia until on its eradication is seen burdened by some structural factor or (and especially) cultural factor. The wrong perception concerning studied object, Corruption eradication methodology that used and sociology theory that used as the approach.

In the first stage research, have done analyses of discourse to problem status, which will study, a while in second stage will do grounded research through observation and circumstantial interview. Thereby, all of this research process at the all of stage will taking place with successively to social discourse and grounded research about corruption, capitalism and capitalism model that manifest in Indonesian, Chinese community and relation between many aspects with see agency-structural linkages. Method between qualitative that do in all process in this research using symbolic interaction approach, a while analyze that done use structuration perspective. The result will write in descriptive argumentation style as critical reading to corruption phenomena in Indonesian.

Result of first stage of research show if corruption practices happen because embededness economy importance that constituted of work ethos that diffraction of Chinese culture namely ethics of Chinese business, war strategy which tend to the make lawful all way of applied as strategy for the shake of capital accumulation, and some cultural value system like principle ' *guang shi*'. In turn agency (Chinese entrepreneur following its cultural ethos) braiding each other with the structure (economic and political system of Indonesian) so that realize the cronny-capitalism, what in turn in order to effort of corruption eradication become the cultural constraint becoming factor determine for successunsuccess strive the corruption eradication in Indonesian.

(Keyword: structure-agency, Chinese abroad, cronny- capitalism)

KATA PENGANTAR

Korupsi dan pemberantasannya selama ini selalu berkonotasi kepada pegawai negeri dan birokrasi pemerintah, khususnya bidang pelayanan. Meskipun stigmatisasi tersebut tidak keliru, tetapi tidak benar secara *in it self* Karena pada dasarnya korupsi juga terjadi di luar profesi pegawai negeri, karena siapapun orang dengan berbagai profesinya bisa melakukan praktik korupsi; di samping itu didasari kenyataan bahwa korupsi juga banyak terjadi di luar birokrasi pemerintahan. Artinya pengertian, pemaknaan, kajian dan ruang lingkup pemberantasan korupsi harus diperbaharui secara komprehensif. Salah satu wilayah yang hampir tak tersentuh dalam diskursus tentang korupsi dan pemberantasannya adalah dunia perdagangan di Indonesia yang subyek atau person-person yang dominan di bidang tersebut adalah berasal dari komunitas Cina peranakan (Cina yang dibesarkan di Indonesia) atau Cina perantauan (lebih merujuk pada pensikapan komunitas Cina yang lebih merasa dirinya sebagai orang asing di negeri ini). Dalam dunia kapitalisme (perdagangan dan industri) di Indonesia, mereka mengembangkan praktik, kiat, strategi yang pada dasarnya berbeda dengan yang dilakukan dalam model kapitalisme Barat, dimana jika dalam kapitalisme Barat *fair competition* menjadi landasan dalam persaingan dagang; sedangkan dalam kapitalisme kaum peranakan lebih mengandalkan prinsip-prinsip yang cenderung kolutif.

Dengan demikian sebuah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi 'wacana' (dalam pengertian omong kosong) jika upaya tersebut tidak melihat aspek keberadaan masyarakat Cina di Indonesia dan berbagai etos sosial mereka yang dikembangkan (terlanjur berkembang) dalam hubungan-hubungan ekonomi dan politik Indonesia. Dengan kata lain membicarakan korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena kapitalisme perkoncoan yang telah menjadi mainstream; selanjutnya menganalisis kapitalisme perkoncoan tersebut secara niscaya akan menyangkut etos kerja kapitalisme komunitas Cina di Indonesia berikut sistem nilai kultural yang terlekat di dalamnya. Penelitian ini ingin menyingkap tabir tersebut dan membongkar tabu-tabu atas nama SARA, dan meletakkan persoalan hubungan Cina-Kapitalisme-Korupsi pada kerangka akademis yang seharusnya.

Surabaya, Oktober 2010
Edy Herry Pryhantoro

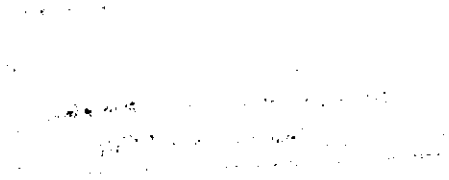

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan i

A.LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY ii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN Vi

I.PENDAHULUAN 1

I.A.Latar Belakang Masalah 1

I.B.Fokus Penelitian 4

I.C.Tahapan Penelitian 5

II.TINJAUAN TEORITIS 7

II.A.Hasil Penelitian Terdahulu 7

II.B.Perspektif Kultural Tentang Korupsi 13

II.C.Perspektif Struktural Tentang Korupsi 17

II.D.Teori Strukturasi Sebagai Pisau Analisis 23

III.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 42

III.A.Tujuan Penelitian 42

III.B.Manfaat Penelitian 43

IV.METODE PENELITIAN 44

V.PEMBAHASAN 46

V.A.Korupsi oleh Sektor Swasta 46

V.B.Korupsi Dalam Kapitalisme Kroni di Indonesia 49

V.C.Korupsi Kaum Peranakan di Indonesia Dewasa Ini 53

V.D.Analisis Strukturasi Terhadap Kroniisme 58

VI.KESIMPULAN DAN SARAN 71

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 80

B.SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

BAB I PENDAHULUAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

I. A. Latar Belakang Masalah

Selama ini terlanjur terdapat persepsi yang salah dalam memandang fenomena korupsi di Indonesia, yakni: *Pertama,* anggapan bahwa seolah-olah fenomena korupsi adalah semata-mata perkara hukum, padahal fenomena korupsi di Indonesia yang sudah begitu berurat-berakar adalah pertama-tama perkara sosiologis sehingga penye]esaiannya haruslah didekati secara sosiologis. *Kedua,* bahwa korupsi adalah warisan budaya lama (utamanya Jawa) yang mengalami enkulturasi dari generasi ke generasi, padahal yang benar adalah bahwa korupsi bukanlah warisan budaya masyarakat Indonesia 'mengadopsi' perilaku konsumtif adalah semenjak mengenal sistem birokrasi modern yang dibawa oleh kolonial Belanda (VOC) yang menegaskan permisahan hak privat dengan hak publik. *Ketiga,* karena anggapan di atas, yang lebih disorot sebagai actor pelaku korupsi adalah masyarakat pribumi utamanya yang termasuk dalam pegawai birokrasi pemerintahan. Padahal korupsi juga menggurita di dunia bisnis; sementara dunia bisnis di Indonesia yang menyangkut produksi dan distribusi barang-barang komoditas dan jasa ditengarai lebih dari 70 % dari total asset nasional dikuasai oleh swasta, dengan dominasi kaum Cina peranakan Indonesia yang memang selama berabad-abad lalu menguasai bidang tersebut. Sementara kaum Cina peranakan ini — sama dengan beratus etnik-etnik lain di Indonesia - membawa kultur berikut sistem-nilai dan etos social yang dalam pergaulan sosialnya akan dipraktikkan dan saling mempengaruhi. *Keempat,* dalam pemberantasan korupsi selama ini terjadi saling silang untuk mendahulukan

salah satu aspek, yakni manusianya (agen) ataukah sistemnya (struktur) yang lebih dulu harus diperbaiki. Pada galibnya kedua aspek tersebut saling berkelindan secara simultan dalam menciptakan kondisi-kondisi sosial yang rentan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini hendak mengkaji sisi-sisi yang disebut di atas, dan berhipotesis bahwa mengguritanya korupsi di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan, tender proyek-proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan masyarakat, termasuk lembaga perijinan; sama sekali tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kuatnya pengaruh kaum Cina peranakan sepanjang sejarah bangsa Indonesia sejak masa kolonial hingga pasca-reformasi sekarang. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil tema yang berkaitan dengan kapitalisme yang dipraktikkan oleh kaum Cina peranakan, juga atas dasar kerangka teoritik yang tidak memisahkan agen yang menciptakan kultur dengan struktur yang membingkai perilaku social dalam hubungan-hubungn social yang lebih besar.

Sehingga dengan demikian, penelitian ini menghubungkan kultur yang melatarbelakangi perilaku komunitas Cina peranakan (atau Cina perantauan, atau Tionghoa, atau "Chokin" dalam bahasa gaul) di Indonesia, dengan struktur masyarakat Indonesia yang lebih luas, yang di dalamnya terkandung berbagai nilai budaya dan etos sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, yang dalam periode sejarah panjang pra-kolonial, kolonial dan pasca keinerdekaan, telah bertaut-berkelindan membentuk 'mozaik budaya'

Indonesia kontemporer dan membangun 'konstruksi social' nation-state Indonesia kekinian.

Telah diketahui bersama bahwa domain stuktur masyarakat Indonesia kekinian, yakni yang terkonsentrasi pada kekuasaan negara dan sistem distribusinya yang di *embedded* oleh kepentingan ekonomi dan bisnis (secara individual maupun kelompok), telah menciptakan system perpolitikan, system perekonomian dan perdagangan, mekanisme peradilan dan kinerja birokrasi yang rentan korupsi. Fenomena pengaruh struktral ini cenderung lebih dominan dibanding domain kultur. Dalam proses terjadinya korupsi, kultur lebih berfungsi sebagai katalisator sosial yang menumbuh-suburkan perilaku koruptif, sebagai media yang cenderung permisif terhadap praktik-praktik korupsi. Hal yang terakhir disebut bisa dirujuk dalam studi-studi sejarawan dan sosiolog Belanda, seperti Wertheim dan Furnivall.

Studi Furnivall menegaskan hal tersebut. Sejak tahun 1800-an perusahaan Belanda, *Dutch East India Company* atau Kongsi Dagang Hindia Timur yang sering disebut dengan VOC *(Vereniging Oost Indische Compagnie)* atau `Kompeni', telah memberikan contoh praktik korupsi. Pegawai rendahan VOC digaji sangat sedikit dibanding atasan-atasan mereka yang dominan orang Belanda. Status sebagai pegawai VOC yang gengsinya di atas rata-rata pribumi, meskipun bergaji rendah, menuntut (memaksa) mereka bergaya hidup seperti atasan mereka, dan jalan yang ditempuh adalah dengan korupsi -- pemalsuan pajak dan cukai, pungutan-pungutan liar kepada kaum pribumi, dan menyogok atasan agar mendapat

kenaikan pangkat atau kedudukan yang lebih baik, dan sebagainya –, sehingga kaum pribumi yang menjadi pegawai pemerintah kolonial dan para pamong praja dan kaum priyayi, terbiasa dan mencontoh perilaku tersebut.

Situasi kultural semacam ini membentuk etos kerja yang rentan korupsi dan secara sinergis lalu berpadu dengan perilaku dagang komunitas Cina, yang didasari oleh prinsip *'guang shi'* (hubungan personal), yang kemudian berkembang secara negatif sebagai praktik-praktik kolusi. Praktik-praktik pemberian uang terima kasih, uang administrasi dan balas jasa atas selesainya suatu urusan, kemudian menjadi sumber terjadinya berbagai kasus gratifikasi, yang akibat langsungnya adalah pengistimewaan (perlakuan secara khusus) kepada para pengusaha tertentu oleh pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan.

Situasi semacam ini tak berubah secara mencolok dalam periode sejarah Indonesia kontemporer, meskipun telah melewati sejarah panjang sejak masa konsolidasi nation-state pasca-proklamasi, masa kekuasan Orde Lama, masa kekuasaan Orde Baru, hingga masa `reformasi' yang telah melalui kekuasaan Habibie, Gus Dur, Megawati maupun SBY-Kalla; praktik-praktik korupsi yang menyangkut bertaut-berkelindan-nya agen (bersama kultur komunitasnya) dengan struktur (sistem) kekuasaan, utamanya yang menyangkut ranah ekonomi, hukum dan politik. Dalam konteks seperti inilah penelitian ini menemukan urgensinya.

I.B.Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah *linkage* agen-struktur saling mengandaikan dalam memberi kontribusi bagi terjadinya praktik-praktik korupsi di Indonesia dalam lingkup kapitalisme di Indonesia.

2. Praktik-praktik korupsi macam apakah yang dominan dilakukan dalam model kapitalisme yang dianggap khas dalam dunia usaha kaum peranakan atau Cina Perantauan di Indonesia.

3. Modal sosial dan modal budaya macam apakah yang menjadi penopang berjalannya kapitalisme kaum peranakan di Indonesia yang membangun dan mengkonstruksi 'bangunan korupsi' sehingga begitu massif di Indonesia.

I. C.Tahapan Penelitian

Pada penelitian tahap pertama terutama akan memfokuskan ranah penelitian ini lebih pada analisis wacana terhadap fenomena korupsi yang secara main-stream dilakukan di kalangan kaum peranakan (Cina perantauan) dalam praktik-praktik kapitalisme mereka yang khas. Pada tahapan ini kajian akan dilakukan terhadap faktor-faktor kultural yang menjadi latar belakang tindakan social-ekonorni mereka, dengan tujuan mengetahui etos budaya dan etos kerja komunitas Cina baik dalam komunitas asalnya maupun dalam komunitas mereka (sesudah bersentuhan dengan kultur setempat) di Indonesia. Hal ini mengandaikan kompleksitas problem yang hendak dijelaskan (yakni kaitan agen-struktur) mengingat begitu seorang individu dari komunitas Cina terlahir maka sosialisasi pertama-tama yang ia dapatkan adalah kultur keluarga Cina dengan segala implikasi sosial-

budayanva, oleh karena internalisasi nilai-nilai kultural-socialnya pertama-tama diperoleh dari lingkungan keluarga. Baru kemudian berseiring pertumbuhan dunia sosialnya, yang biasanya dimulai pada saat mulai usia sekolah, system nilai sosial-kultural yang lebih luas dan majemuk barulah didapatkan. Sehingga dalam tahap pertama, penelitian ini lebih focus pada agen dengan segenap kultur komunitasnya yang lebih banyak dielaborasi.

Pada tahap kedua, focus penelitian tetap pada bidang yang sama, namun desain penelitian dan pemilihan subyek-subyek yang diteliti akan dilakukan secara lebih eksplisit. Pada penelitian tahap kedua akan dilakukan penelitian dengan model kualitatif dan mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposif dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sekaligus dalam penelitian tahap kedua akan dikonfirmasikan secara lebih jauh berbagai wacana menyangkut status persoalan dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tahap pertama. Dengan demikian pembahasan yang lebih detail tentang bagaimana kesaling-terkaitan agen dengan struktur akan lebih dilakukan ada tahap kedua penelitian ini.

II.TINJAUAN TEORITIS

II.A.Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor structural yang mendorong terjadinya tindakan korupsi adalah kepentingan-kepentingan ekonomi dan bisnis yang mengembeded (berhimpitan) dengan modus-modus kekuasaan. Ketika sebuah kekuasaan dalam berbagai tingkatnya -- negara, pemerintah daerah, kantor dinas dan perusahaan-perusahaan swasta — tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang memadai. tidak adanya transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan serta dibarengi dengan sikap tidak professional dalam pekerjaannya menjadi media utama bertumbuhnya perilaku koruptif dari tingkat yang paling sempit, yakni individu, (yang kadangkala terjadi secara aksidental karena munculnya peluang yang tak direncanakan), kemudian meluas secara institusional kelembagaan dengan upaya sistematis mengakali kendala-kendala birokrasi, dan akhirnya terjadi secara sistemik dalam hal mana perilaku koruptif telah menyebar, tidak hanya di lingkungan birokrasi pelayanan publik, tetapi meluas di seluruh lapisan masyarakat dan karena bersifat rutin sehingga menjadi genre baru perilaku ekonomi masyarakat.

2. Secara struktural yang berperan besar terhadap berkembangnya korupsi adalah sector birokrasi pemerintah dan pelayanan publik, perilaku dan mekanisme perpolitikan di dalam negeri serta penyelenggaraan system peradilan yang tidak bebas kepentingan dari

lembaga-lembaga terkait (kepolisian, kejaksaan, advocad dan kehakiman).

3. Faktor-faktor kultural yang membuka peluang dan menjadi katalisator sosial maraknya perilaku korupsi terutama adalah primordialisme dan system patronase yang dibawa oleh berbagai budaya etnis yang telah lama ada di Indonesia, termasuk budaya Cina. Ketika primordialisme dan patronase tersebut tidak mampu ditransformasikan dalam tata kehidupan dunia modern secara lebih cerdas, maka akan memunculkan perilaku yang bersifat kolektif. Istilah "budaya korupsi" adalah *side effect* demi kehidupan modern.

4. Budaya Cina yang dipraktikkan oleh komunitas Cina peranakan atau Cina perantauan telah berperan aktif menumbuh-suburkan korupsi di negeri ini sepanjang sejarahnya semenjak masa kolonialisme. Hal ini berkait dengan posisi komunitas ini yang meskipun terpinggirkan secara social, namun dominan di dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan ekonomi pada umumnya. Dikuasainya lebih dari 70 % asset ekonomi nasional di bidang distribusi dan pengadaan barang dan jasa, menjadi pintu masuk yang sangat terbuka bagi intemalisasi etos kerja, etika berdagang serta trik-trik berdagang yang diinsprasikan oleh ajaran-ajaran Konfucianisme, Taoisme dan terutama etika perang Sun Tzu, ditambah dengan etos-baru tentang hubungan kekayaan dengan kemuliaan dan negeri Cina modern.

5. Berbagai budaya dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara mempunyai potensi yang sama memunculkan

fenomena sosial yang kemudian diberi label "budaya korupsi", tergantung pada luas dan tidaknya dominasi budaya etnis tadi dalam "tata pergaulan" kekuasaan dan ekonomi. Persentuhan budaya yang sudah lama terjadi sepanjang sejarah pra-republik hingga masa Indonesia kontemporer secara signifikan memunculkan dominasi etika dagang Cina dalam berbagai bentuk pertukaran (kapitalisme) di Indonesia.

6. Kapitalisme perkoncoan adalah bentuk *erzats capitalism'* (kapitalisme semu) yang dominant dalam praktik kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme perkoncoan yang didominasi pengusaha Cina peranakan menjadi model mainstream dalam praktik kapitalisme di Indonesia yang di dalamnya instrinsik terkandung praktik-praktik yang rentan korupsi, sebagai akibat tak langsung maupun langsung dari ajaran "*guang shi'* di bidang perdagangan.

Telah diketahui diatas bahwa domain struktur, yakni konsentrasi kekuasaan Negara dan sistem distribusinya yang di-*embedded* oleh kepentingan ekonomi dan bisnis (secara Individual maupun kelompok) telah menciptakan sistem perpolitikan, mekanisme peradilan dan kinerja birokrasi yang rentan korupsi, lebih dominan dibanding domain kultur. Dalam proses terjadinya korupsi, kultur lebih berfungsi sebagai katalisator sosial yang menumbuh-suburkan perilaku koruptif. Dalam konteks ini Baharuddin Lopa (mantan Sekjen Komnas HAM, dan Jaksa Agung) dalam tulisannya di SWA (1997) menyebut adanya dua sasaran korupsi; yakni korupsi material *(material coruruption)* dan korupsi politik *(political corruption)* yang keduanya biasanya berhubungan. Deskripsi di atas lebih

menunjuk pada sasaran korupsi yang pertama (suap-menyuap dan manipulasi dana). Korupsi politik adalah manipulasi di bidang politik seperti manipulasi perhitungan suara hasil pemilu. Dalam banyak kasus terjadi korupsi ganda, korupsi material sekaligus korupsi pilitik. Penyediaan dana dari sejumlah pengusaha (terutama Cina, untuk Capres *incumbent* oleh pengusaha "M P" dan bos PT "S") untuk membiayai pemilu presiden 2009 sebuah partai tertentu dengan jumlah yang melebihi ketentuan bisa dikategorikan korupsi ganda ini. Demikian pula jika seorang penguasa (presiden) demi untuk mempertahankan kekuasaannya atau memperpanjang masa jabatannya membuat peraturan-peraturan yang tendensinya seperti di atas, misalnya melakukan monopoli sejumlah kegiatan perdagangan (menguntungkan kroninya) — seperti yang dilakukan Marcos dan Soeharto — adalah juga termasuk korupsi ganda ini. Praktik ini ditengarai tetap berjalan hingga sekarang dalam setiap kekuasaan, hanya orangnya (penguasa dan pengusahanya) yang berbeda. Sistem korupsinya tetap sama.

Korupsi yang berkaitan dengan motif-motif politik ini biasanya dipermudah dengan menempuh jalan pintas, yakni menumbuhkan sistem monopoli yang memudahkan seorang pengusaha tertentu memperoleh keuntungan untuk mengumpulkan dana bagi tujuan-tujuan politik partai yang ditunjuk patronnya. Pada saat ini, korupsi model di atas tidak selalu melibatkan partai politik. Jika seorang (kelompok) yang berkuasa menganggap partai tidak siap atau terlalu lemah untuk menjalankan program pemenangan Pemilu Presiden, maka oleh penguasa dan kelompoknya ini akan dibentuk satu atau beberapa team sukses yang

bekerja melalui mekanismenya sendiri, yang seringkali organisasi dan sistem kerjanya tidak transparan, untuk memenangkan Pemilu presiden. Salah satu caranya adalah dengan menggelontor `sembako' kepada masyarakat lapisan bawah dengan tujuan `membeli' suara mereka dalam Pemilu Presiden. Modal bagi bekerjanya team ini serta pendistribusian barang termaksud pastilah membutuhkan modal yang besar. Modal ini diperoleh dari pengusaha-pengusaha Cina, baik perorangan maupun kelompok organisasional, yang tentu saja pengeluaran modal ini didasari kepentingan bisnis pengusaha-pengusaha Cina tersebut; manakala tokoh politik yang mereka dukung memenangkan Pemilu presiden. Tidak jarang seorang pengusaha yang sama `membotohi' atau `ngopeni' beberapa calon berbeda yang berpeluang menang. Yang memprihatinkan lagi, modal yang sudah dikeluarkan tersebut pada masanya akan dihitung sebagai 'modal usaha' yang dicatat sebagai biaya produksi perusahaannya. Akibatnya balas budi yang harus didapat dari calon yang didukungnya haruslah sepadan dengan modal yang telah dikeluarkan ditambah bunganya.

Sedangkan `kolusi' pada mulanya adalah praktek bisnis yang terjalin melalui hubungan yang saling menguntungkan antara cukong (umumnya pengusaha cina) dengan para pejabat pemerintah (umumnya yang berlatarbelakang militer). Mulai soeharto di pucuk pimpinan, para jendral di lingkungan inti istana, Pangdam, Gubernur, hingga pejabat pemerintah tingkat bawah. Ditengarai Soeharto telah menjalankan perilaku kolutif sejak ia masih menjadi Pangdam Divisi Diponegoro Jawa Tengah di masa pemerintahan Soekarno. Pola

hubungan ini tetap diwariskan hingga ia berkuasa selama 32 tahun, tiap penguasa baik di pusat maupun daerah memiliki jaringan kolusi dengan pengusaha-pengusaha Cina yang berkepentingan dengan bisnisnya atau peluang bisnis di daerah tersebut di masa datang.

Sistem ekonomi yang terjalin melalui pola hubungan "cukongisme" merupakan hubungan timbal-balik. Pengusaha Cina memiliki uang, sedangkan para pejabat pemerintah mengandalkan diri pada pemberian proteksi dan fasilitas melalui pengaruh kekuasaan yang mereka miliki. Sebagai imbalan atas pemberian fasilitas dana kepada patron politiknya, para pengusaha Cina tersebut mendapat perlindungan politik dan keamanan, bebas dari beban pajak tertentu, memperoleh fasilitas dana segar dari perbankan karena direkomendasi, maupun akses terhadap lisensi perdagangan. Berbekal kolusi bisnis yang terjalin dengan para birokrat pemerintah, para konnglomerat dan pengusaha Cina pada umumnya akhirnya memperoleh akses yang cukup mapan dalam memperoleh kredit, informasi pasar maupun kontrakkontrak dengan fihak investor luar negeri. Bagi pengusaha Cina, siapapun yang jadi penguasa di Indonesia tidak masalah, yang penting bagi mereka adalah orientasi politik ekonominya, apakah menguntungkan ataukah sebaliknya bagi kepentingan bisnis mereka. Dalam situasi politik-ekonomi yang tidak kondusif dan beresiko bagi kepentingan bisnis mereka, maka melarikan modal ke luar negeri, terutama ke negeri Cina atau Negara-negara Asia Tenggara yang ekonominya didominasi komunitas Cina perantauan adalah pilihan pertama yang akan dilakukan. Menjual saham dan trik-trik bisnis lainnya merupakan alternative berikutnya.

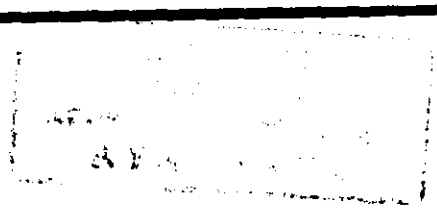

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Meskipun sebagai kelompok minoritas mereka tidak memiliki akses politik yang berarti, namun berkat fasilitas ekonomi yang begitu besar pada gilirannya mereka punya pengaruh politik yang cukup besar, tidak hanya mengatur arah kebijakan ekonomi saja; bahkan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kebijakan politik dalam hal-hal tertentu, misalnya kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan negara Singapura atau RRC.

II.B.Perspektif Kultural Tentang Korupsi

Banyak pengamat sosial menyatakan bahwa faktor yang secara dominan mempengaruhi perilaku korupsi dalam masyarakat adalah kebudayaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Gunnar Myrdal (1986: 82) misalnya, menyatakan bahwa korupsi banyak terjadi di daerah Asia Selatan dibandingkan di negara barat disebabkan faktor kebudayaan. Salah satu faktor mengapa korupsi sulit diberantas adalah karena ia sudah berkembang menjadi apa yang oleh Edward Shils (1981 32) disebut "pengetahuan diam-diam" *(tacit knowledge)* yang mengerangkai dan menggerakkan hampir seluruh kolektif bangsa ini. Disebut pengetahuan diam-diam karena orang enggan menyebut-nyebut keberadaan korupsi, tetapi ia menerimanya sebagai sesuatu yang nyata.

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, proses terbentuk kesadaran korupsi berjalan melalui mekanisme reproduksi budaya yang berlangsung lama dan bertahap, yang pada suatu titik tertentu membuncah menyentuh kesadaran eksistensial kedirian bangsa. Seolah berlaku asumsi, tidak ada cara lain menjadi warga negara RI selain melalui korupsi (*to be Indonesia*

means to corrupt) Keberadaan korupsi bukan lagi sekedar bumbu, tetapi menjelma sebagai "pilar" dalam kehidupan bangsa. Jika di negara yang berindeks korupsi rendah, tindak korupsi adalah penyimpangan, sedangkan korupsi dinegeri ini nyaris, bahkan sudah terlanjur dianggap peraturan *(rule)*.

Menurut Scott (dalam Mas'oed, 1993: 170), timbulnya korupsi bisa berupa struktural maupun kultural. Dalam masyarakat Indonesia faktor kultural yang menimbulkan korupsi adalah adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacamnya kepada pejabat pemerintah. Masalah budaya yang muncul semenjak zaman kerajaan feodal ini tetap terpelihara sampai masa birokrasi modern, seperti bentuk upeti ole.h bawahan untuk atasan dengan maksud untuk mendapatk.en kenaikan pangkat promosi ataupun kedudukan dalam instansi tertentu. Upeti dari masyarakat terhadap pejabat pemerintahan agar kerabatnya lolos tes masuk pegawai negeri sipil dan lain-lain. Budaya upeti yang belakangan didefinisikan sebagai suap-menyuap atau uang pelicin terpelihara secara rapi dalam struktur birokrasi di Indonesia hingga kini.

Sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan parokial lainnya, dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-pertama adalah memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etnik. Sehingga saudara yang mendatangi untuk mencari previlege sulit untuk ditolak. Dalam masyarakat tradisional, nepotisme merupakan bentuk korupsi yang sudah menjadi kewajiban keluarga.

Sebaliknya jika seseorang tidak mendahulukan kerabatnya akan dipandang sebagai tindakan yang tidak lumrah.

Sejak jaman kolonial, pribumi dipaksa bekerja dengan gaji yang sangat minim. Itulah yang membuat mereka akhirnya terdorong melakukan praktek korupsi, meski masih berskala sangat kecil. Budaya ini lambat laun menular ke generasi berikutnya dan semakin meluas ke segala aspek. Untuk meredamnya agak sulit lantaran rninimnya sanksi-sanksi yang bisa dikenakan. Studi Furnivall menegaskan hal ini. Sejak tahun 1800-an, salah satu perusahaan Belanda, *Dutch East India Company,* sudah memberikan contoh praktek korupsi. Saat itu, para pekerja, yang kebanyakan pribumi menerima gaji jauh lebih rendah dari apa yang mereka lakukan di perusahaan itu. Selain itu, banyak sekali pemerasan yang dilakukan kepada pribumi, namun mereka tidak mengeluh. Akhirnya, para pribumi yang mempunyai kedudukan tinggi (priyayi), mencoba mempertahankan hidup dengan mencari keuntungan. Salah satunya adalah membantu tindakan Belanda melakukan pemungutan pajak berlebih kepada petani, dengan harapan ikut mendapat keuntungan. Cara lainnya adalah, dengan memberi suap pada pejabat Belanda dengan harapan mendapat kedudukan yang lebih baik.

Senada dengan studi di atas, Wertheim menyebut beberapa sebab sehingga korupsi begitu subur di Indonesia. Menurut Wertheim, sebagian gejala korupsi di Indonesia disebabkan oleh ***pertama***, tetap berlakunya kewajiban-kewajiban tradisional kepada sub-struktur birokrasi patrimornial. Kemudian yang ***kedua,*** disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana para

pegawai terutama yang rendahan tidak hidup secara wajar, sehingga dapat dipahami bahwa para pegawai ini kemudian mencari penghasilan tambahan. ***ketiga,*** Korupsi disebabkan oleh keinginan para pegawai, yang tak mau kalah tata kehidupannya dengan golongan-golongan masyarakat lain. Dalam hal ini golongan yang dimaksud atau yang dianggap sebagai perbandingan adalah para pengusaha-pengusaha bangsa asing dan nasional.

Selanjutnya untuk memperdalam perspektif kultural tentang fenomena korupsi, menjadi menarik ketika kita mencermati studi Heddi Shri Ahimsa Putra di sejumlah wilayah di Indonesia yang masih menerapkan sistem politik lokal-tradisional. Sistem politik lokal-tradisional di Indonesia memang sejak awalnya berbeda dengan sistem politik dan rasionalitas birokrasi modern. Sistem politik lokal-tradisional mengandung didalamnya persoalan substansial dari gugusan nilai-nilai budaya yang dianut mayoritas masyarakat, yang tentu akan memunculkan interpretasi yang berbeda jika dilihat menggunakan kacamata yang lain (yakni kacamata Barat yang modern) dan bahwa korupsi adalah persoalan pendefinisian, yakni siapa mendefinisikan apa, untuk siapa dan terhadap siapa (Ahimsa Putra, 1999: 51).

Beberapa ciri umum yang membedakan sistem politik lokal-tradisional di Indonesia dengan sistem politik modern, yang ***pertama*** adalah pewarisan kedudukan yang berdasarkan atas hubungan kekerabatan. Seseorang dapat menduduki posisi politis karena dia adalah keturunan atau kerabat pejabat sebeluinnya, ***Kedua,*** tidak terlihat

pembedaan yang jelas antara kepentingan pribadi seorang pejabat dengan masyarakat umum yang juga harus dia perhatikan. Kepentingan pribadi seorang pejabat dijadikan kepentingan umum, karena seorang pejabat disitu adalah juga wakil dari masyarakat, tetapi bisa juga sebaliknya, kepentingan umum dipandang sebagai kepentingan pribadi. ***Ketiga,*** tidak terlihat spesialisasi yang sangat ketat. Seorang kepala pemerintahan harus menjadi hakim, penghulu (untuk perkawinan), komandan dalam perang dan jabatan lainnya. Pendeknya, sebuah jabatan politis juga memiliki fungsi sosial, ekonomis, sekaligus umum. Sistem politik tradisional semacam itulah yang masih bertahan dalam banyak masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah. Termasuk pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia kemudian harus berhadapan dengan budaya Barat yang rasional dan mengenal sistem birokrasi 'modern' dan dipaksa mengikuti budaya tersebut.

Birokrasi Barat modern yang memiliki empat ciri yakni: spesialisasi, suatu hirarkhi wewenang, suatu sistem aturan, dan *impersonality.* Sistem politik dan pemerintahan tersebut pada dasarnya merupakan suatu yang asing bagi masyarakat tradisional Indonesia. Dari empat ciri tersebut, unsur *impersonality* merupakan unsur yang biasa dikorup (Ahimsa-Putra, 1999: 53).

Maka jika norma-norma terkait dengan jabatan publik tidak didefinisikan dengan balk, apa yang bagi pengamat Barat tampak sebagai korup bisa dikatakan tidak korup dalam konteks setempat. Analisis tentang korupsi dan pembangunan rnemandang sebuah kultur berkenaan dengan

norma-norma kultur lain. Dalam banyak konteks, bisa dikemukakan bahwa memberi hadiah kepada pejabat publik merupakan praktek wajar. Korup dan tidaknya adalah hingga batas tertentu, 'khas secara kultural', dalam artian bahwa hal itu bergantung pada norma-norma yang ada dalam masing-masing budaya (Mozaffar Qizilbash, 1999). Studi Heddy menunjukkan bahwa masalah korupsi adalah masalah budaya sekaligus juga masalah pendefinisian, pemaknaan, dimana terkandung relasi kekuasaan. Gejala sosial korupsi tidak dapat dipahami tanpa memahami hal-hal yang bukan korupsi, artinya tindakan korupsi berada dalam kerangka perangkat nilai yang jika berdiri sendiri tidak akan terlihat salah atau korup. Dengan kata lain, korupsi hanya bisa dipahami secara kontekstual atau relasional dengan gejala lain.

II.C.Perspektif Struktural Tentang Korupsi

Perspektif ini memusatkan perhatian pada upava untuk mencari jawab tentang mengapa suatu kehidupan sosial secara teratur dan berpola secara tetap serta bagaimana *order* itu dipertahankan. Jika sebagai asumsi dasarnya masyarakat lebih dominan dibanding individu maka konsep sentral yang sering digunakan adalah: struktur, konformitas, fungsi dan disfungsi. Tokoh yang sering menjadi rujukan perspektif ini adalah Talcott Parsons dan terutama Robert K. Merton yang secara lebih khusus menganalisis dinamika struktur sosial yang mengarah pada terciptanya konformitas karena keseimbangan sosial dan perubahan di dalamnya hanya dapat dipahami melalui strukturnya terlebih dahulu.

Istilah "struktur sosial" merujuk kepada suatu sistem yang didalamnya terdapat unit (unsur-unsur) sosial yang membentuk keseluruhan struktur sosial itu dalam kondisi stabil dan berpola. Kestabilan dapat dicapai karena masing-masing unsur atau unit analisis menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan norma-norma yang telah dipolakan berdasarkan kesepakatan diantara mereka. Masing-masing unsur memberikan peranannya bagi pembentukan kondisi yang stabil dengan melaksanakan pola-pola perilaku yang disepakati bersama. Dalam bahasa Merton, masing-masing unsur bersifat fungsional satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu keharmonisan atau keteraturan sosial. Kehidupan sosial masyarakat tidak mungkin berlangsung stabil dan teratur apabila masing-masing unsur dan atau unit tersebut tidak mengarahkan upayanya ke arah kestabilan dan keteraturan. Untuk itu diperlukan adanya pola-pola perilaku yang dianut secara bersama-sama, tujuan bersama, dan cara-cara untuk mencapai tatanan tersebut.

Setiap sistem mempunyai 4 fungsi memaksa. Artinya, setiap sistem harus menghadapi dan harus berhasil menyelesaikan masalah-masalah: adaptasi, pencapaian tujuan, interaksi, dan pemeliharaan pola yang tersembunyi. Keempat fungsi memaksa ini diterapkan pada tingkat "tindakan umum". Adaptasi adalah fungsi perilaku organism untuk mencapai tujuan adalah fungsi kepribadian; integrasi adalah fungsi sosial, dan pemeliharaan pola adalah fungsi kultur. Pada tingkat sistem sosial, fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, secara berurutan berhubungan dengan ekonomi, pemerintahan, hukum dan keluarga.

Dalam segi sosial tersebut terdapat standarisasi perilaku yang sesuai dengan peran *(role)* masing-masing individu yang memaksanya untuk terikat satu sama lainnya sehingga membentuk struktur secara keseluruhan. Dengan kata lain, individu tersubordinasi ke dalam kepentingan, tujuan dan cara mewujudkannya berdasarkan norma-norma sosial yang sudah ada. Sehingga dalam struktur sosialnya individu tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Keseimbangan sosial terjadi manakala individu berintegrasi dalam keteraturan sosial. Kepentingan individual dibenarkan sejauh selaras dengan tujuan dan cara yang dimiliki kelompok.

Apabila fenomena korupsi dikaji dari perspektif fungsionalisme struktural, maka fenomena ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari ke-tidakteratur-an sosial yang terjadi oleh ketidaksesuaian antara tugas individu dengan tujuan kelompok atau antara tujuan yang ditekankan oleh kelompok. Akan didapati individu tertentu yang karena tujuan pribadinya bertentangan dengan tujuan kelompok, inilah yang disebut penyimpangan. Jika penyimpangan ini berlangsung dalam rangka penggunaan suatu kekuasaan dan disertai dengan orientasi untuk kepentingan pribadinya, seperti uang dan sebagainya, maka bentuk penyimpangan inilah yang disebut sebagai "perilaku menyimpang" (Ismail, 1999: 5-6).

Meskipun korupsi dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, namun perilaku tidak boleh dipandang selalu berdampak negatif atau disfungsional, namun terdapat beberapa perilaku korupsi itu yang mempunyai dampak atau konsekuensi positif atau fungsional. Dengan menggunakan pandangan Robert K. Merton (Johnson, 1983: 149), maka dari hal tersebut menentukan

perilaku korupsi bersifat disfungsional atau fungsionai, terutama terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini harus dinilai lebih besar mana antara dampak negatif dan positifnya. Dampak positif atau negatif ini oleh Merton dijelaskan melalui konsep "manifes" yaitu dampak-dampak yang sejak semula dikehendaki, dan yang menunjuk pada dampak ikutan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Konsep ini digunakan Merton ketika ia mengkaji tindakan korupsi di Chicago.

Penentuan dampak ada yang dampak manifes atau laten ditentukan setelah melalui pengkajian kasus-kasus yang terjadi. Hanya saja, alternatif-altematif dampak apa yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi secara apriori sejak awal. Pengidentifikasian dampak menjadi penting artinya dalam rangka membandingkan antara dampak negative dan positif dari setiap perilaku korupsi. Dengan mengkaji alternatif-alternatif yang terjadi dapat diketahui adanya keseimbangan antara dampak negatif dan positifnya, atau justru dampak negatifnya lebih besar dari suatu perilaku korupsi. Apabila dampak negatifnya lebih besar maka akan terjadi suatu proses perubahan ke penyesuaian sehingga tercipta keseimbangan baru, yaitu keteraturan sosial dapat dikembalikan. Penyesuaian ini bermuara pada dua bentuk. ***Pertama***, penolakan terhadap fenomena korupsi yang terjadi dan memunculkan mekanisme sosial lain, yang kemudian diterima oleh sistem, atau kedua, penerimaan fenomena korupsi sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Adanya kecenderungan masyarakat untuk memandang pemberian uang suap untuk memperoleh suatu pekerjaan sebagai sesuatu "perkara biasa" merupakan indikasi bahwa telah berkembang penyesuaian nilai untuk menerima perilaku seperti itu bukan sebagai penyimpangan.

Pendekatan diatas dalam khasanah teori sosial lazim disebut perspektif konsesual karena penekanannya pada "konsensus". Sedangkan pendekatan yang perspektif strukturalis tetapi yang penekanannya pada pengaturan konflik berpendapat bahwa keteraturan social adalah sebagai hasil dari kontrol kelompok dominan (penguasa/atau pemilik modal) terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kenyataan social yang ada sebenarnya hanya konflik kepentingan antara kelompok dominan dengan kelompok yang dikuasai. Untuk mewujudkan status sosialnya, kelompok pemegang kekuasaan mengembangkan gaga hidupnya berbeda dengan kelompok yang dikontrolnya, dicarilah simbol-simbol sosial yang, membedakan status sosialnya dengan kelompok yang diperintah (dikontrol). Semuanya dapat dilakukan karena adanya dukungan pendapatan yang mereka peroleh. Selanjutnya Ismail (1999: 5-12) menyebut bahwa dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang dipegangnya dan sekaligus mencegah semakin meningkatnya intensitas kelompok pemegang kekuasaan menyediakan sarana penyaluran konflik, seperti pembentukan institusi tertentu untuk menyalurkan aspirasi dan pandangan dari kelompok yang diperintah. Cara demikian akan mengurangi tekanan konflik antara kedua kelompok, sehingga peluang untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*) semakin besar.

Namun demikian, cara mempertahankan kekuasaan dan menekan seperti di atas mengandung potensi terjadinya tindakan korupsi oleh pemegang kekuasaan. Mengikuti pandangan C. Wright Mills, sarana penyaluran konflik diatas dari sisi ini dapat dipandang sebagai institusi formal sehingga wajar jika pembiayaannya tergantung oleh organisasi (negara atau

perusahaan), tetapi dilihat dari tujuannya untuk nempertahankan kekuasaan, maka kelompok pemegang kekuasaan telah menggunakan kepentinganpublik (organisasi) untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kasus Buloggate menunjukkan hal ini, manakala penggunaan dana-dana non-budgeter dan penggunaan dana Banpres adalah contoh yang populer. Pembiayaan tersebut secara formal seolah-olah sah (karena disiapkan payung hukum untuk itu). Namun dilihat secara lebih dalam lagi sifatnya mengandung tindakan korupsi karena tujuan yang dicapai hanyalah kepentingan kelompok, yakni guna mempertahankan "*status quo*".

Untuk mempertahankan "*status quo*" tersebut. Mills juga mengemukakan terdapat cara cara lain, yakni:

a. Memberi suap kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki potensi besar mengusik kemapanan kelompok yang berkuasa. Pemberian dana kepada partai-partai politik yang kritis dan kepada kelompok agama yang berhaluan keras adalah contohnya.
b. Memberi bantuan khusus kepada kelompok yang pernah dirugikan karena tindakan atau kebijakan yang dilakukan *rulling-class.* Kasus Kedung Ombo, Tanjung Priok, Lampung dan Peristiwa 27 Juli (kudatuli) adalah beberapa contohnya.
c. Pembentukan kebijakan yang berhubungan dengan pembelanjaan keuangan negara ditujukan untuk memberikan keuntungan kepada para pendukung pemegang kekuasaan, baik di lingkungan pemegang kekuasaan itu sendiri maupun pendukung yang ada dalam kelompok yang dikuasai. Ditengarai bahwa pada masa Orde Baru, sejumlah 89 dari 527

Peraturan Pemerintah (PP) dijadikan *trojan-horse* dan pengaman hukum bagi *vested-interest* para pendukung rezim.

d. Melakukan praktek koncoisme atau kolusi kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membuat proyek, memperoleh tender dan rnenjalankan praktik-praktik yang kini dikenal sebagai *kapitalisme crony.*

Berbagai gerakan sosial anti korupsi di Indonesia dewasa ini, terutama yang berpendekatan intelektualis banyak yang menggunakan perspektif strukturalisme-konflik, yang dipadu dengan teori fungsionalisrne khususnya yang menyangkut perilaku yang menyimpang (NU dan Muhammadiah adalah contohnya). sedangkan di kalangan kaum mudanya, aktivis dan mahasiswa, perspektif yang Marxian terlihat cenderung lebih dominan.

II.D.Teori Strukturasi Sebagai Pisau Analisis

Giddens yang menulis di masa pergeseran epistemologis tahun 70-an, pada mulanya tidak memilih metodologi lengkap untuk teori strukturasinya. Tetapi kekurangan ini segera ditutupi pada tahun-tahun selanjutnya (Bottomore dengan merujuk Stone, 1996). Untuk tujuan metodologis cukup bisa dilihat bahwa tidak ada isi substantive atau empiris yang dikemukakan dalam konsep-konsep Giddens. Ketika Giddens beralih untuk menulis teori modernitasnya pada 1990-an, ia merasa perlu untuk menetapkan bagaimana ide-ide substantifnya – misalnya konsep ruang dan waktu – dengan menggunakan konsep ontologisnya yang lebih generik. Hal ini terlihat misalnya lewat elaborasi – yang ringkas namun cukup representative – yang dilakukan Ritzer dalam buku 'Teori Sosial Postmodern' (2005: 240-249) tentang usaha Giddens untuk menciptakan kesan, dan narasi besar, untuk

menandingi pemikiran para pemikir klasik. Ia ingin menegaskan bahwa ontology strukturasionis adalah mencakup kehidupan social pada umumnya. Tulisan ini, yang dimaksudkan untuk mengelaborasi problema sosiologi tentang paradigma, membatasi diri untuk tidak menyoroti tulisan Giddens pasca 90-an. Tulisan ini lebih menekankan pada karya Giddens sebelum tahun 90-an, utamanya kepada beberapa aspek dalam buku *The Constitution of Reality.*

Anthony Giddens adalah anggota kehormatan pada Kings Colege dan Profesor Sosiologi pada Universitas Cambridge. Sepanjang dasawarsa silam ia telah menerbitkan lebih dari dua puluh buku dan meneguhkan dirinya sebagai pemikir terkemuka. Tulisan-tulisan Giddens mengkombinasikan suatu eksegesis yang seksama atas karya-karya klasik dengan kepekaan terhadap isu-isu teori social yang kontemporer terpenting.

Giddens mengungkapkan bahwa teori sosial semenjak masa klasik hingga tahun 1960an ditandai oleh serangkaian asumsi pra-teoritis yang kurang memadai bagi studi tentang kehidupan social. Para pemikir terdahulu cenderung menggunakan interpretasi naturalis dalam teori social dan terlampau berpijak pada filsafat positivis, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk reduksionis dan esensialis dalam berteori. Giddens mengkritik kecenderungan positivis yang memandang masyarakat sebagai ekspresi prinsip identitas dan perkembangan yang melandasi masyarakat itu. Dalam skema demikian ini, pelaku direduksi menjadi produk-produk kekuatan sosial yang impersonal dan determinative. Reproduksi masyarakat lebih dipandang sebagai hasil mekanis daripada suatu proses aktif dan penuh kemungkinan

yang dijalankan oleh pelaku, sehingga menimbulkan kecacatan, yakni lebih mengutamakan masyarakat daripada pelaku sehingga terjerumus ke dalam obyektivisme yang sesat (Daniel Ross, dalam: Beilharzt, 2002).

Cacat ini menampak dalam paham Positivisme-struktural (Parsons), yakni dalam 3 hal: ***Pertama***, fungsionalisme meniadakan fakta bahwa kita anggota masyarakat bukanlah orang-orang dungu. Kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita, bukan robot yang bertindak berdasarkan naskah atau yang sebelumnya sudah diskenariokan. ***Kedua,*** fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa system social punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Giddens, system social tidak punya kebutuhan apapun, yang punya kebutuhan adalah para pelaku. ***Ketiga***, fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosil (Giddens, 1979) Akibatnya terjadi dualisme antara statik dan dinamik

Dominasi Positivisme mendapatkan tantangannya dalam tradisi hermeneutika, filsafat bahasa dan fenomenologi. Ketiga pandangan ini telah menghindari asumsi-asumsi positivis dan diskusi telah banyak menyumbang pemikiran bagi konseptualisasi tindakan yang lebih memadai (Beilharz, 2002). Hanya saja mazhab interpretative ini perhatiannya terlalu berfokus pada produksi aktif kehidupan sosial tanpa mengembangkan konsep analisis structural sama sekali. Mazhab interpretatif memandang bahwa sekelompok manusia menciptakan masyarakat, namun sulit mengakui bahwa sekelompok manusia tersebut tidak melakukan hal tersebut dalam situasi yang dipilihnya sendiri. Giddens menyatakan bahwa pendekatan interpretative tak memiliki cukup kemampuan untuk memperhitungkan baik kondisi-kondisi sebab-

akibat (kausalitas) maupun konsekuensi tindakan yang tak terduga. Bentuk pemikiran interpretative oleh sebab itu terjebak pada ekstrem sebaliknya, yakni lebih mengutamakan pelaku daripada masyarakt sehingga terperosok dalam subyektivisme.

Kegagalan kedua kutub pemikiran tradisional di atas untuk mengkonseptulisasikan secara memadai hakekat struktur dan tindakan serta relasi antar keduanya, mendorong Giddens untuk memutuskan perlunya sebuah rekonstruksi terhadap teori-teori social tradisional. Usaha ini dilakukannya dengan pertama-tama melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran terpenting, yakni sosiologi interpretative, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan basis pemahaman ketiga tradisi tersebut sekaligus hendak menemukan cara mengatasi kekurangan di ketiga mazhab tersebut, sembari menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rencana tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep: tindakan, struktur dan system; dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi sebuah pendekatan baru. Pendekatan ini disebutnya sebagai 'teori strukturasi'. Hal yang layak dicatat adalah, meskipun ia lebih suka menganggap proyeknya ini sebagai langkah rekonstruksi, alih-alih sebagai sintesis, kian hari semakin menjadi jelas bahwa strategi sintesis memang tampak menonjol dalam karyanya.

Dalam dataran inilah usaha rekonstruksi Giddens terlihat, yang secara ontologis dan epistemologis ingin membangun sebuah paradigma baru yang menjembatani dua paradigma terdahulu yang saling bertolak belakang. Dua paradigma terdahulu dalam definisi Ritzerian disebut paradigma fakta social

(obyektivisme) dan paradigma definisi social (subyektivisme). Tetapi jika diskursus paradigma yang digunakan adalah menurut pandangan sosiologi kontemporer Habermasian, yang membagi paradigma ilmu social menjadi tiga, yakni: paradigma positivistic, paradigma interpretative dan paradigma Kritis, maka usaha Giddens bisa dikategorikan kedalam paradigma ketiga.

a. Paradigma Kritis

Konotasi paradigma Kritis bisa merujuk pada dua pemikiran klasik: Kant dan Marx. Kant menyebut sebuah pengetahuan dikategorikan kritis ketika ia mengambil jarak terhadap dominasi pengetahuan yang sebelumnya ada. Dalam perkara Kant, filsafatnya disebut filsafat kritis karena hendak menjembatani pertarungan pandangan antara Empirisme (obyektivisme epistemologis) dan Rasionalisme (subyektivisme epistemologis) kemudian sekaligus menjembatani distansi antara keduanya. Sedangkan dalam filsafat social modern, Marx mengambil jarak terhadap klaim-klaim ilmu ekonomi merkantilis (David Ricardo dan Adam Smith) dan mengungkap secara kritis berbagai kepentingan yang tersembunyi dalam ideologi kapitalis dengan merekonstruksi pemahaman filsafat sejarah Hegelian, sekaligus merumuskan gerak sejarah secara baru dan kreatif melalui konsep dialektika materialisme.

Menurut Ritzer, meskipun Giddens bukan Marxis, namun ada pengaruh besar Marxian dalam karyanya (hal ini sangat logis mengingat karya-karya awal Giddens banyak menyoroti berbagai tradisi besar sosiologi, utamanya karya Durkheim, Marx dan Weber), dan bahkan ia melihat *The Constitution of Society* sebagai cerminan perluasan dictum integrative yang melekat dalam

pemikiran Marx: "Manusia adalah pembuat sejarah, tetapi mereka tak dapat membuat sesuka hatinya; mereka tak dapat membuatnya berdasarkan kondisi yang mereka pilih sendiri, melainkan berdasarkan keadaan yang langsung mereka hadapi, diterima, dan dibawa dari masa lalu" (Marx, 1869, h.15, dalam: Ritzer, 2002, h.507). Meskipun begitu, teori Max hanya merupakan salah satu masukan bagi teori strukturasi diantara berbagai teori dan tradisi sosiologi yang menginspirasinya. Sehingga pada galibnya teori strukturasi merupakan hasil ramuan dari berbagai masukan, karena Giddens meneliti sejumlah besar teori mulai dari teori yang berorientasi individual atau agen (contohnya, interaksionisme simbolik) maupun yang berorientasi masyarakat atau struktur (contohnya, fungsionalisme structural). Dari kedua teori inilah sintesa dalam teori strukturasi yang digagasnya menemukan titik tolaknya.

Teori strukturasi mempertanyakan validitas ontologis dari pembagian yang ada dalam pemikiran social antara anggapan kolektivis dan individualis. Secara umum praktik social dianggap sebagai bentuk dasar kehidupan social. Morfologi kolektif dari jaringan dan system dianggap sebagai mata rantai penghubung berbagai praksis yang direproduksi dari waktu ke waktu oleh banyak individu dalam rentang tahun, dekade bahkan secara lintas-generasi. Properti substantive kolektif dari kelompok social dianggap sebagai kode cultural dan sumber daya kekuatan yang direproduksi melalui praksis social, sering dengan cara diam-diam, di semua jenis kelompok mulai dari organisasi formal hingga ke peradaban. Ketegangan dan kontradiksi structural memunculkan problem luas dalam praktik social yang menimbulkan ritme perubahan yang lebih cepat. Apa yang oleh Giddens

diistilahkan sebagai dualitas struktur adalah urutan pemunculan kode cultural dan sumber daya kekuasaan sebagai cara awal dan hasil dari proses reproduksi (atau revisi) dalam praktik social.

b. Dualitas Agen-Struktur

Tujuan fundamental dari teori strukturasi (menurut Bernstein, 1989:23) adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Implikasinya adalah bahwa agen dan struktur bersifat saling mengandaikan. Keduanya tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain bagaikan dua sisi mata uang dari keeping yang sama. Dengan begitu seluruh tindakan social memerlukan struktur, dan sebaliknya seluruh struktur membutuhkan adanya tindakan social sebelumnya. Dikatakan oleh Ritzer (2002: 508) bahwa agen dan struktur berkait berkelindan tak terpisahkan dalam seluruh praktik atau aktivitas manusia.

Struktur memungkinkan adanya tindakan, ia merupakan sarana bagi tindakan, namun pada saat yang sama struktur hanya bisa direproduksi 'di dalam' dan 'melalui' tindakan. Giddens menyebut hal ini sebagai 'dualitas struktur' (*duality of structure*). Struktur tidak dapat diidentifikasi semata-mata sebagai kendala ataupun lawan bagi tindakan (seperti dalam strukturalisme); bagi Giddens struktur memungkinkan (*enabling*) sekaligus menghalangi (*constraining*); struktur dengan demikian merupakan sarana sekaligus hasil dari tindakan. Sehingga sekaligus yang mencirikan 'hakekat' struktur yang semacam ini (dan membedakannya dengan konotasi struktur dalam strukturalisme) adalah bahwa struktur hanya eksis pada saat

instansiasi dalam tindakan sehingga ia tak dapat eksis (mengada) dalam ruang dan waktu. Struktur adalah sebuah potensi dan hanya memiliki 'eksistensi virtual', sedangkan individu dilihat sebagai agen yang melakukan praktik social.

Struktur, sebagai aturan dan sumber daya, merupakan bagian dari system social namun tidak boleh dikacaukan pengertiannya dengan system social. Sistem social memang memiliki kekuatan menstrukturkan dan system social itu kurang lebih adalah totalitas terstruktur namun pada dirinya sendiri ia bukanlah struktur. Jadi system social dipahami sebatas sebagai praktik-praktik social yang direproduksi di sepanjang ruang dan waktu. Ia sangatlah bervariasi sejalan dengan derajad kesatuan dan integrasi internalnya yang tergantung pada hakekat penstrukturnya. Giddens menggunakan konsep strukturasi untuk menghubungkan konsep struktur dengan system. Strukturasi system social adalah proses dimana kekuatan-kekuatan dalam suatu system dijalankan dan diteguhkan kembali dalam praktik-praktik yang mengukuhkan system tersebut (Daniel Ross, dalam Beilharz, 2005: 195).

Berdasarkan bacaan terhadap karya-karya Giddens akan diperoleh ikhtisar pengertian struktur sebagai berikut:

(1) merupakan sarana (*medium*) dan hasil (*outcome*) praktik social yang membentuk system dan institusi social;
(2) berbentuk skemata sumberdaya yang menjadi prinsip berlangsungnya praktik-praktik social yang tidak bersifat membatasi (jadi *enabling*);
(3) bersifat aplikatif sesuai sifat aktifitas pelaku;

(4) terdapat dalam kondisi 'ada dalam ketiadaannya dan tiada dalam keberadaannya';

(5) berrelasi secara tak terpisahkan dengan agen; dan

(6) obyektivitasnya tidak bersifat eksternal, melainkan ber'embeded' dengan tindakan dan praktik social yang dilakukan agen.

Dengan demikian pengertian dualitas struktur (*duality of Structure*) menyangkut dua hal, yakni:

(1). Bahwa agen bukan sosok yang terpisah dari struktur, sementara struktur bukan sesuatu yang sama sekali terpisah dari agen, dan

(2). Bahwa struktur juga tidak dapat dipisahkan dengan praktik-praktik social yang dilakukan oleh para agen, sehingga praktik-praktik social yang dilakukan para agen juga akan mengikuti struktur. Sebagai konsekuensinya posisi dualitas struktur terdapat dalam dua hal: dalam proses pembentukan struktur sebagai hasil keterulangan praktik-praktik social yang dilakukan oleh para agen; dan dalam tindakan-tindakan para agen yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu yang hanya bisa dipahami dalam skemata lintas ruang dan waktu (atau struktur).

Dalam konteks yang lebih mikro, yakni menyangkut agen-agen individual, struktur adalah *rule of resources* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika fungsi struktur menurut Durkheim bersifat *constraint* (mengekang, mengatur, membatasi) sehingga individu hanya bersifat mereproduksi, menurut Giddens struktur bersifat *contraining* sekaligus *enabling*, memfasilitasi dan membuka peluang bagi individu untuk memproduksi. Dalam konteks ini maka praktik social merupakan

pengulangan tindakan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan tergantung perilaku individunya.

Dengan mengkonsepsikan masyarakat sebagai praktik-praktik social yang direproduksi (diperbaharui dan dicipta ulang) sepanjang lintasan ruang dan waktu, maka Giddens menghindari kekeliruan obyektivis yang memandang masyarakat sebagai suatu hakekat yang bersifat pradefinisi serta mereduksinya menjadi sejumlah prinsip penjelas yang mendasar. Demikian pula konsep Giddens tentang tindakan memandang pelaku bukan sebagai obyek yang dideterminasi (dipaksa, diikat) maupun sebagai subyek yang bebas sepenuhnya. Giddens mengikuti jalan yang ditempuh subyek untuk menciptakan dirinya sendiri melalui partisipasi dalam praktik-praktik social yang terus berlangsung.

c.Bentuk-bentuk Institusi dan Dimensi Internal Agen

Seperti sudah disebutkan bahwa Giddens menolak dualisme subyek dan obyek, agensi dan struktur serta struktur dan proses, dan mengganti nisbah diantara keduanya dengan hubungan dualitas. Dualitas struktur struktur memandang struktur dan tindakan individu berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi lembaga dan relasi-relasi social. Artinya, actor merupakan hasil (*outcome*) dari struktur namun sekaligus menjadi perantara bagi pembentukan struktur-struktur baru. Sementara struktur oleh Giddens dipandang sebagai aturan-aturan (*rule*) dan sumber daya (*resources*). Aturan-aturan tersebut bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna memberikan kerangka pemaknaan (interpretative scheme) dan norma. Sedangkan sumberdaya menunjuk pada distribusi sumberdaya alokatif

(ekonomi) dan sumberdaya otoritatif (politik), yang terkait langsung dengan persolan kekuasan politik (Faisal, 1998: 66).

Struktur tersebut tidak meiliki bentuk tertentu yang kasat mata, melainkan sebagai skemata-skemata yang bersarang dalam memori kita dan bersifat melintasi ruang dan waktu, sehingga hanya tampak dalam praktik-praktik social (Subanda, 1991). Sama seperti halnya tata-bahasa yang kan menciptakan ungkapan dan kalimat yang bail, dan kalimat yang baik ini akan membentuk struktur bahasa; demikian pula struktur yang berisi aturan dan sumber daya ini akan memberi kendala dan pelung bagi actor untuk bertindak, dan berdasarkan perturan dan sumber daya tersebut actor/pelaku akan menghasilkan kembali institusi dan relasi-relasi social dalam masyarakat (Surbakti, 1995: 45).

Dari berbagai prinsip strukturasi, Giddens memperlihatkan tiga gugus besr dalam struktur, yakni (1) struktur signifikansi, yang menyangkut skemata simbolik, penyebutan dan wacana; (2) struktur dominasi, yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi); dan (3) struktur legitimasi, menyangkut skemata peraturan normative yang manifest dalam tata hukum. Mekanisme tersebut berlangsung melalui skema tiga prinsip structural dalam perspektif strukturasi yakni skema S-D-L (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi) sebagai berikut (Herry-Priyono, 2003: 25):

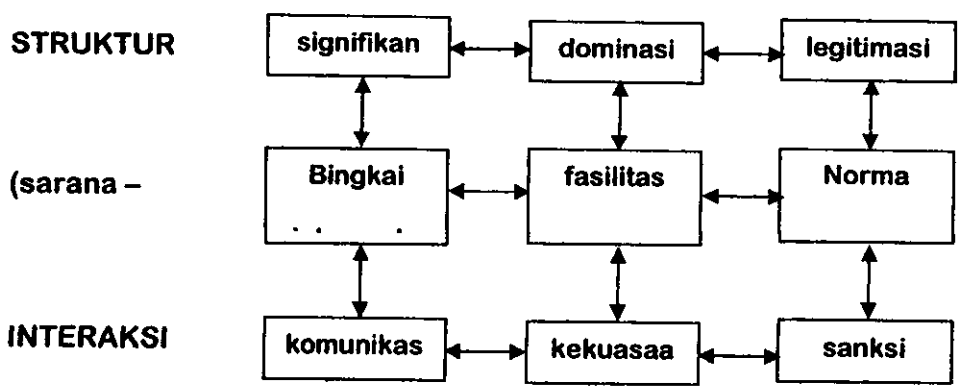

Dalam skema inilah pola hubungan tiga prinsip structural dengan praktik social saling bertautan.

Reproduksi social berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik social (lewat interaksi) seperti itu. Problemnya adalah: apakah kita para pelaku tahu dan sadar akan hal tersebut? Jawaban Giddens lugas: kita tahu. Masalahnya tahu tidaklah selalu berarti sadar (*conscious*), apalagi sebagai kapasitas untk menjelaskan hal itu sebagai proses yang rinci, sistematis dan gamblang (Herry-Priyono, 2003: 28). Giddens membedakan 3 dimensi internal pelaku, yakni motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) (Giddens, 1984: 5-7).

Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri (contoh: sangat jarang pegawai negeri memakai seragam karena digerakkan oleh motivasi memperkuat kekuasan Negara). Kesdaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bias diurai (contoh:diam saat memasuki tempat ibadah). Rutinisasi hodup personal dan social terbentuk melaui kinerja gugus kesadaran praktis ini. Kesadaran praktis inilah yang merupakan kunci untuk memahami prose bagaimana berbagai tindakan dan praktik social kita lambat laun menjadi struktur . Reproduksi social berlangsung lewat keterulangan praktik social yang jarang kita pertanyakan lagi. Sementara kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita

merfleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita (contoh: mengapa seseorang bekerja lembur, karena membutuhkan uang tambahan untuk membayar biaya perawatan anaknya di rumah sakit).

Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah lentur dan tipis, tidak seperti antara kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar (Giddens, 1984: 4). Dengan meminjam gagasan Goffman, Giddens mengajukan argument bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (konsep *reflexsive monitoring of conduct*). Perubahan social akan terjadi manakala kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas, sehingga berlangsung 'de-rutinisasi'. De-rutinisasi menyangkut gejala dimana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik social kita tidak lagi memedai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik social yang sedang berlangsung, ataupun yang tengah diperjuangkan agar menjadi praktik social baru.

d. Perentangan Ruang-Waktu

Perentangan ruang-waktu adalah penjabaran system-sistem social melintasi dimensi tempo-spasial yang didasarkan pada mekanisme dan integrasi system social. Sementara itu interaksi system merupakan hubungan timbal-balik antara perilaku individual maupun kelompok dalam rentang ruang-waktu yang diperluas di luar kehadiran satu sama lain (*co-presence*). Artinya semakin luas jangkauan perentangan ruang-waktu suatu system social, semakin tertanam system social tersebut dalam ruang dan waktu

social serta semakin tahan (liat, massif, resisten) terhadap perubahan oleh pelaku individual (Giddens, 1981).

Dalam melihat hubungan perentangan ruang-waktu, yang biasanya (dalam dramaturgi Goffman) dipahami sebagai arena panggung tindakan; kemana kita masuk dan dari mana kita keluar, Giddens menyatakan bahwa ruang-waktu bukanlah arena tindakan, melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Oleh sebab itu harus menjadi unsur integral dalam pembahasan teoritik ilmu social (Giddens, 1981)

Konstitusi ruang-waktu ini memiliki posisi sentral dalam gagasan Giddens. Baginya perbedaan bentuk masyarakat bukan terletak pada perbedaan cara produksi (sebagaimana dalam Marxisme), melainkan terletak dalam cara masing-masing masyarakat mengorganisasi hubungan antar ruang-waktu. Negara, misalnya, adalah pemangku kekuasaan yang didasarkan pada kontrol atas pengaturan ruang-waktu. Penjelasannya adalah karena manusia secara riil hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang kontinum.

Perentangan ruang-waktu ini digunakan Giddens dalam elaborasinya tentang tipologi tiga bentuk masyarakat dalam sejarah (Giddens, 1984: 181-182):

Tribal Society	**Class-devided Society**	**Capitalism (Class Society)**
<u>Prinsip Strukturasi:</u>		
Adat	Simbiosis kota	Negara-Bangsa

Tradisi dan Pedalaman *Surveillance*

Pertemuan-muka Pemisahan Ekonomi

dan Politik

←----------→

RENDAH Perentangan Ruang-Waktu TINGGI

Apa yang disebut 'masyarakat tradisional' merupakan gugus cara hidup yang terorganisir menurut kesatuan aksis ruang-waktu (misalnya jual beli barang membutuhkan pertemuan tatap muka (*co-presence*), sedangkan sekarang transaksi jual beli bias dilakukan sekejap lewat telpon.

Dengan merujuk filsafat Heidegger (dalam *On Time and Being*), Giddens bersetuju bahwa manusia (modern) bukanlah sekedar ada dalam waktu tetapi ia 'mentransendir' waktu, mengambil sikap terhadap waktu, yaitu konteks relasi manusia terhadap masa lalunya, kekiniannya, dan masa depannya. Bagi manusia (modern) yang penting bukan hanya ia hidup dalam ruang dan waktu melainkan juga bagaimana ruang dan waktu itu dihidupi. Manusia, dengan demikian, jangan hanya ditentukan oleh ruang dan waktu, tetapi juga harus menentukan ruang dan waktu. Pemikiran Giddens mengenai masyarakat modern dengan problem kekuasaannya, yang dielaborasinya dengan konsep 'jalan ketiga' menampakkan implikasi teorinya tentang konsep ruang-waktu tersebut.

Di dalam rentang 'ruang dan waktu' yang menjadi arena berbagai tindakan social pelaku-pelaku social, Giddens menekankan perlunya menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan hakikat temporal kehidupan social. Ia menyatakan bahwa kesalingtergantungan antara tindakan dengan struktur

hanya bisa dikonsepsikan sebagai hubungan temporal. Hal ini mengandaikan bahwa perubahan social senantiasa merupakan hal yang implicit dalam interaksi social karena setiap proses tindakan merupakan produksi tindakan baru, meski berada dalam konteks yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan demikian pemahaman tentang adaptasi dalam strukturasi sangat berbeda dengan pandangan fungsionalisme, karena system sosial eksis sebagai praktik-praktik yang direproduksi. Sebagai praktik-praktik yang direproduksi maka system social tidak memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri *(in itself)*. Reproduksi tersebut adalah proses yang penuh kemungkinan dan didasarkan pada aktivitas para pelaku.

e. Implikasi Teoritis Giddens

Melalui teori strukturasinya, Giddens mencoba melihat pengerjaan ulang teori social sebagai sebuah fondasi yang lebih kokoh bagi sosiologi – dan ilmu social pada umumnya – secara prinsip dengan mengakomodasi secara lebih efektif terhadap konsep 'struktur sosial' (perspektif Durkheimian) dan 'tindakan sosial' (perspektif Weberian). Lebih dari itu Giddens berusaha menawarkan kebebasan terakhir dari sejarah materialisme (merujuk Marx) yang dikritisinya sebagai sebuah teori perubahan social yang belum memadai – utamanya bagi masyarakat modern dewasa ini – serta menawarkan sebuah teori 'fungsionalis' (melengkapi Parsons) dalam ranah bahwa sistem social tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan fungsi-fungsi atas bagian masyarakat. Lebih jauh lagi teori strukturasi hendak direpresentasikan sebagai sebuah teori non-evolusioner (menolak historisisme sosiologis dan determinisme sejarah), dimana manusia

yang akan membuat perbedaan dalam reproduksi institusi social karena dari situlah perubahan social akan tercipta.

Sebaliknya, berhadapan dengan arus besar pendekatan posmodernisme yang tengah '*ngetrend*' sepanjang dekade 90an, Giddens bereaksi tidak secara frontal. Kehadiran perspektif postmodernitas dimengertinya sebagai sedang munculnya tatanan sosial baru yang berbeda dengan institusi-institusi modernitas. Namun, alih-alih menggunakan istilah postmodernitas, Giddens lebih suka menggunakan istilah "modernitas yang teradikalisasi" (*radicalized modernity*) untuk menggambarkan dunia kita yang mengalami perubahan hebat dan sedang melaju kencang bagaikan *Juggernaut* (panser raksasa) yang hampir tak bisa lagi dikendalikan, suatu dunia yang tunggang-langgang (*runaway world*) dengan 'masyarakat resiko'-nya. Alih-alih setuju dengan postmodernitas yang mewartakan berakhirnya epistemologi, Giddens lebih percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah situasi "modernitas yang sadar diri" (Giddens, 1990: 45-53), yakni sebuah masyarakat modern yang tengah berusaha menyadari resiko atas proyek modernitas yang digagasnya.

f. Evaluasi dan Kritik

Kendatipun teori strukturasi dapat mengatasi pelbagai kekurangan dalam pemikiran tradisional, teori tersebut merupakan jawaban yang kurang memadai bagi tugas yang menantang teori social kontemporer. Proyek rekonstruksi dan sintesis Giddens secara inheren adalah teori yang konservatif. Menjadikan tindakan dan struktur bisa lebih terbuka antara satu dengan yang lain adalah sebuah pembaruan, namun hal itu belum hal itu

sama sekali membantu melenyapkan perbedaan di antara keduanya. Merupakan kenyatan yang irons bahwa Giddens sebagai pengritik Parsons yang terkemuka, tetap gagal menyadari sejauh mana proyeknya sendiri merupakan kelanjutan warisan Parsonian.

Karya Giddens juga dipandang sebagai kurang orisinal dalam pemikirannya. Karena sebagai perangkat metodologis, teori strukturasi kurang memiliki kemampuan untuk melahirkan konsep-konsep yang substantive (sebagaimana Durkheim dengan '*collective conscience*'nya, Weber dengan '*instrumental rationality*'nya atau Marx dengan 'alienasi'nya). Dalam mencapai tujuannya, yakni nisbah struktur dan tindakan, elaborasi Giddens bagaikan parasit terhadap karya pemikir lain, yang ditunjukkan dengan adanya eklektisisme dalam tulisan-tulisannya. Sementara adanya keyakinan bahwa teori dapat disempurnakan terpisah dari obyeknya (karya-karya awal Giddens lebih merupakan refleksi dan elaborasi teoritik terhadap karya-karya sebelumnya, daripada hasil penelitian lapangan), mengandung asumsi-asumsi tersembunyi. Hal ini dapat berakibat munculnya anggapan bahwa teori dapat lebih lengkap (dan sempurna) daripada obyeknya, yakni realitas yang dikaji. Strategi rekonstruksi dan sintesis yang berusaha memisahkan teori dari akar sejarahnya, serta distorsi terhadap pertautan antar keduanya, dapat mengakibatkan reifikasi (pembedaan) atas teori. Kekuatiran terhadap bias ini tampaknya terjadi pada teori strukturasi.

Dalam kaitan ini pula kritik Ian Craib (1992, seperti dikutip dan ditandaskan Ritzer, 2003: 513-514) selayaknya dikutip untuk digaris bawahi. Craib mengkritik teori strukturasi Giddens dalam 5 hal berikut: *Pertama,*

karena Giddens memusatkan perhatian pada tindakan social semata, sehingga karyanya mempunyai kekurangan 'kedalaman ontologis' sehingga gagal menerangkan struktur social yang melandasi kehidupan social. *Kedua*, upayanya membuat sintesis teoritis tak bertautan secara pas dengan kehidupan social. Kehidupan social yang sangat kompleks dan ruwet ini tidak bisa dijelaskan secara memadai dengan menggunakan pendekatan tunggal yang secara konseptual rapi, seperti teori strukturasi ini. *Ketiga*, karena Giddens tak bertolak dari landasan teoritis tertentu (melainkan menggunakan berbagai pendekatan secara eklektik, pen.), maka ia kekurangan basis memadai untuk membuat analisis kritis tentang masyarakat modern. *Keempat*, akibat logisnya teori Giddens kelihatan sangat fragmentaris, sepenggal-sepenggal dan tidak berkaitan secara utuh. *Kelima*, sukar untuk mengetahui secara pasti apa yang sesungguhnya dibicarakan Giddens. Namun demikian kritik Craib ini diimbangi dengan dua adendum berikut, bagaimanapun teori Giddens layak dibahas mengingat banyak di antara pemikiran Giddens telah menjadi bagian integral sosiologi kontemporer, dan siapapun yang berkarya dalam teori social perlu memperhitungkan dan menanggapi karya Giddens. Penulis setuju dalam hal-hal yang terakhir ini, karena bukankah ilmu pengetahuan itu bersifat tentative?, sehingga dari karya-karyanya akan merangsang pemikiran kreatif dan baru, sebagai usaha mengelaborasi karya-karya Giddens.

Tak urung Daniel Ross juga mengkritik bahwa jika dihadapkan pada persoalan-persoalan penting yang menyangkut kondisi manusia masa kini, teori strukturasi tak menyuarakan apa-apa karena hanya mengajukan konsepsi yang terbatas mengenai teori social sebagai kritik. Selanjutnya

Ross menyatakan bahwa karya Giddens sebaiknya dipandang sebagai catatan akhir (*postscript*) bagi berbagai kecenderungan utama pemikiran sosil di abad ke-20 (Ross, 2005: 198)

Sebagai catatan akhir, Bottomore (2005) menyebut, meskipun Giddens telah mengalihkan perhatiannya pada bidang lain (yakni dari teori social yang lebih umum ke teori tentang modernitas akhir), penerimaan konstruktif dan kritis atas ontologi strukturasionisnya tidak menunjukkan penurunan. Tetapi, seperti istilah lain semisal solidaritas, legitimasi, dan peran social; ide strukturasi dewasa ini mengalami transisi menjadi konsep 'sosiologi generik'. Proses ini kini mencapai titik dimana ia dianggap sebagai istilah, yang didefinisikan sebagai konstruksi kehidupan social melalui praktik social tanpa mengutip pada sumber apapun sama sekali.

III.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.A.Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah usaha akademis untuk menjawab permasalahan yang muncul sebagai berikut: (a) Bagaimanakah *linkage* agen-struktur saling mengandaikan dalam memberi kontribusi bagi terjadinya praktik-praktik korupsi di Indonesia dalam lingkup kapitalisme di Indonesia, (b) Praktik-praktik korupsi macam apakah yang dominant dilakukan dalam model kapitalisme yang dianggap khan dalam dunia usaha kaum peranakan atau Cina Perantauan di Indonesia, dan (c) Modal social dan modal budaya macam apakah yang menjadi penopang berjalannya kapitalisme kaum peranakan di Indonesia yang membangun dan mengkonnstruksi `bangunan korupsi' sehingga begitu massif di Indonesia.

Sehingga dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan akan: (1) Menyumbang dan melengkapi wacana (akademis) tentang korupsi. Jika selama ini korupsi lebih sering dikaitkan dengan birokrasi dan sebagian budaya local-tradisional, maka penelitian ini melengkapinya dengan korupsi (yang dipahami dan mungkin dilakukan) oleh dan dalam komunitas etnik Cina; yang notabene sebagian besar anggota komunitas ini berkecimpung di dunia usaha dan perdagangan; (b) Menjadi modal pengetahuan bagi para praktisi yang berhubungan dengan upaya-upaya anti-korupsi, sehingga dengan demikian memberikan tambahan perspektif dan analisis yang lebih luas (ekstensif), tidak saja bagi pendidikan anti-korupsi yang tengah dikembangkan di Indonesia, tetapi juga bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun LSM terkait; dan (d)

Sebagai bagian dari upaya melakukan re-konstruksi social menuju masyarakat yang bebas korupsi dalam jangka panjang.

III.B.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan:

1. Menyumbang dan melengkapi wacana (akademis) tentang korupsi. Jika selama ini korupsi lebih sering dikaitkan dengan birokrasi dan sebagian budaya lokal-tradisional, maka penelitian ini melengkapinya dengan korupsi (yang dipahami dan mungkin dilakukan) oleh dan dalam komunitas etnik Cina; yang notabene sebagian besar anggota komunitas ini berkecimpung di dunia usaha dan perdagangan.

2. Menjadi modal pengetahuan bagi para praktisi yang berhubungan dengan upaya-upaya anti-korupsi, sehingga dengan demikian memberikan tambahan perspektif dan analisis yang lebih luas (ekstensif), tidak saja bagi pendidikan anti-korupsi yang tengah dikembangkan di Indonesia, tapi juga bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun LSM terkait.

3. Sebagai bagian dari upaya melakukan re-konstruksi sosial menuju masyarakat Indonesia yang bebas korupsi dalam jangka panjang; sekurang-kurangnya menstimulasi, memberikan analisis sekaligus mendorong terjadinya percepatan proses transformasi social (restorasi social?) dalam perjalanan masyarakat bangsa ini ke depan. Hal ini mengingat bahwa upaya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia meskipun bukan sesuatu hal yang mustahil, namun sisinyalir oleh berbagai pendapat baru aakan terjadi secara alamiah dengan melewati sekurang-kurangnya satu generasi.

IV.METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada perspektif kualitatif yang berpendekatan interpretif (Azevedo, 1997; Colin, 1997; Denzin and Lincoln, 2000; Gubrium and Holstein, 2000); khususnya yang berasal dari tradisi interaksi simbolik Pendekatan ini pada dasarnya memandang intreprestasi atas sebuah tindakan sosial *(sosial action)* sebagai inti dari usaha memahami realitas sosial.

Secara metodologis, penelitian ini menempatkan usaha memahami makna subyektif yang dibangun oleh para pengusaha Cina dalam posisi yang sangat sentral. Karena itu, pemahaman terhadap subyek penelitian dilakukan melalui usaha mendengarkan mereka secara aktif dengan menempatkan subyek dalam posisinya sebagai ahli dari kehidupan, makna dan kepercayaan mereka Pendekatan induktif yang dikembangkan secara luas oleh para peneliti *grounded theory* (Straus and Corbin, 1990), digunakan disini sebagai pijakan untuk membangun kategori dan konsep yang relevan terhadap data, ini berarti bahwa, klasifikasi atas tema dan isu yang secara subyektif dikemukakan oleh para subyek menjadi bagian utama dari usaha peneliti untuk memahami realitas sosial sebagaimana dikonstruksikan oleh para subyek.

Subyek yang diteliti adalah golongan pengusaha Cina, atau para enterpreuner yang pernah bekerja dengan pengusaha Cina, atau para profesional yang bekerja di perusahaan milik orang Cina, dalam persepsi mereka terhadap perilaku korupsi (bisa yang mereka lakukan sendiri maupun tekanan birokrasi pemerintah terhadap mereka dalam

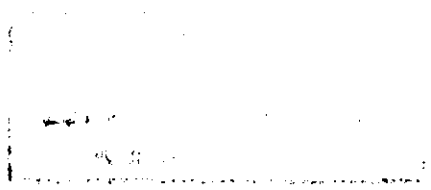

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

urusan bisnis) serta refleksi golongan tersebut terhadap munculnya usaha-usaha anti-korupsi di Indonesia.

Data yang dikumpulkan dikategorisasikan dalam 2 jenis: data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui wacana tentang korupsi, kapitalisme perkoncoan dan etnik Cina di Indonesia, melalui penelusuran ilmiah berdasarkan literatur tentang isu-isu tersebut, di samping penelusuran bacaan dari berbagai media-massa baik cetak maupun elektronik. Sedangkan data primer diperoleh melalui proses wawancara terhadap nara sumber yang ditentukan secara purposif.

Data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema dan sub-tema yang relevan. Pendekatan induktif dipakai sebagai dasar untuk mengorganisasikan data untuk tingkat selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan konsep dan teori yang relevan terhadap subyek dan khidupan mereka (Miles and Huberman, 1994).

Analisis atau narasi dan subyek sebagai narator yang memproduksi narasi dilakukan melalui reflexi *(reflexive methodology)* yang dikenal secara luas dalam tradisi kualitatif (Avesson and Skoldberg, 2000; Hertz, 1996; Steier, 1991). Metode reflexif ini pada dasarnya menekankan sebuah prosedur analisis yang melihat data (seperti narasi subyek) sebagai sebuah produk interpretasi yang dipengaruhi oleh ideologi, politik, gender dan seluruh kepercayaan lainnya yang dihasilkan oleh subyek sebagai narator atau teks dan konteks (Avesson dan Skoldberg, 2000: 4-7).

V.PEMBAHASAN

V.A.Korupsi oleh Sektor Swasta

Ketika korupsi sudah menyentuh langsung dunia usaha (kapitalisme) maka tipologi Alatas tentang jenis-jenis korupsi tidak mencukupi lagi dan harus ditopang dengan konsep *jejaring korupsi* Chambliss. Jejaring korupsi menurut pengertian Chambliss, yang mengadakan pengamatan terlibat di Seatle, (Washington) selama tujuh tahun (1962-1969) mempertemukan unsur birokrat, politis, pengusaha, dan aparat penegak hukum, dimana kepentingan anggota jejaring dilindungi lewat sogokan maupun tekanan fisik.

Aditjondro (2002: 9) mencoba mengawinkan tipologi Alatas dengan model jejaring korupsi menurut Chambliss. Hasilnya adalah suatu model korupsi berlapis tiga:

1. **Korupsi Lapis Pertama.** biasanya berupa suap atau *(bribery)*, yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara; pemerasan *(extortion)*, dimana prakarsa untuk meminta 'balas jasa' datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

2. **Korupsi Lapis Kedua,** adalah berupa jejaring korupsi *(cabal)* antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional.

3. **Korupsi Lapis Ketiga,** yakni jejaring korupsi *(cabal)* berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model

korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga Internasional yang punya otoritas d bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya 'terpilih' oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi Internasional tersebut.

Dalam kerjasama bisnis internasional yang melibatkan banyak person di luar Negara, dan Negara hanya berperan sebagai regulator – sekaligus penyandang dana, mengingat banyak sektor swasta nasional yang menggunakan dana dari sindikasi bank-bank nasional terutama milik pemerintah –, seringkali terjadi missmanagement maupun kesalahan yang dilakukan secara diam-diam dan sengaja, seingga terjadi delik kejahatan korupsi yang merugikan keuangan Negara (baca: uang rakyat). Terdapat berbagai kasus yang sedari pasca reformasi hingga kini belum tuntas.

Tabel I. Beberapa Kasus Korupsi yang Belum Selesai Ditangani

Terdakwa	Kasus	Keterangan
• Ida Bagus Putu Sarga	Pembangunan kantor cabang PT Taspen di 34 kota dengan kerugian Rp. 3 trilliun.	Kejaksaan Agung pernah menetapkan sebagai tersangka, namun kasusnya tidak pernah jelas.
• Sherny Konjongian dan Eko Adi Putranto	BLBI Bank Harapan Sentosa, dengan kerugian negara Rp. 1,9 Triliun	Tidak diketahui keberadaannya. PN Jakarta Pusat telah memvonis 20 tahun penjara.
• David Nusa Widjaja	BLBI Bank Servitia, dengan kerugian negara sekitar Rp. 988 miliar	Tidak diketahui keberadaannya. Kasasi MA memvonis 8 tahun penjara.
• Samadikun	BLBI Bank Modern, dengan kerugian	Tidak diketahui keberadaannya. Kasasi

	negara sekitar Rp. 11,9 miliar.	MA memvonis 4 tahun penjara.
• Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan	BLBI Bank Surya, dengan kerugian negara sekitar Rp. 1,515 Triliun	Tidak diketahui keberadaannya. PN Jakarta Pusat memvonis huhuman seumur hidup.
• Sudjiono	BLBI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan kerugian negara lebih dari Rp. 2 Triliun	Tidak diketahui keberadaannya. MA memvonis 15 tahun penjara.

(Sumber : Litbang *Kompas)*

Selama ini terlanjur terdapat persepsi yang salah dalam memandang fenomena korupsi di Indonesia, yakni:

Pertama, **anggapan bahwa seolah-olah fenomena korupsi adalah semata-mata perkara hukum, padahal fenomena korupsi di Indonesia yang sudah begitu berurat-berakar adalah pertama-tama perkara sosiologis, sehingga penyelesaiannya haruslah didekati secara sosiologis.**

Kedua**, bahwa korupsi adalah warisan budaya lama (utamanya Jawa) yang mengalami enkulturasi dari generasi ke generasi, padahal yang benar adalah bahwa korupsi bukanlah warisan budaya. Masyarakat Indonesia 'mengadopsi' perilaku koruptif adalah semenjak mengenal system birokrasi modern yang dibawa oleh kolonial Belanda (VOC) yang menegaskan pemisahan hak privat dengan hak publik.**

Ketiga**, karena anggapan di atas, yang lebih disorot sebagai aktor pelaku korupsi adalah masyarakat pribumi utamanya yang termasuk dalam pegawai birokrasi pemerintahan. Padahal korupsi juga menggurita di dunia bisnis; sementara dunia bisnis di Indonesia yang menyangkut produksi dan distribusi barang-barang komoditas dan jasa, ditengarai lebih dari 70 % dari**

total asset nasional dikuasai oleh swasta, dengan dominasi kaum Cina peranakan Indonesia yang memang selama berabad-abad lalu menguasai bidang tersebut. Sementara kaum Cina peranakan ini – sama dengan beratus etnik-etnik lain di Indonesia - membawa kultur berikut system-nilai dan etos social yang dalam pergaulan sosialnya akan dipraktikkan dan saling mempengaruhi.

Keempat, dalam pemberantasan korupsi selama ini terjadi saling-silang pendapat untuk mendahulukan salah satu aspek, yakni manusianya (agen) ataukah sistemnya (struktur), yang lebih dulu harus diperbaiki. Pada galibnya kedua aspek tersebut saling berkelindan secara simultan dalam menciptakan kondisi-kondisi sosial yang rentan korupsi di Indonesia.

V.B.Korupsi Dalam Kapitalisme Kroni di Indonesia

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa perilaku ekonomi perorangan maupun kelompok tidak pernah lepas dari etos social yang melingkupinya, dan suatu etos tidaklah muncul secara tiba-tiba melainkan telah dipupuk dan dikondisikan oleh lingkungan sosialnya dalam waktu yang relative lama. Dengan demikian institusi ekonomi yang terbentuk merupakan hasil kreasi social (*social creation*) yang terjadi secara perlahan; yakni sebagai cara melakukan sesuatu yang "mengeras" dan "mengental" dan akhirnya menjadi kiat dalam melakukan sesuatu (Berger dan Luckman, 1990). Dalam realitas konkritnya setiap perilaku ekonomi adalah bentuk perilaku social tertentu (Granovetter dan Swedberg, 1992).

Indonesia adalah negara dimana bentuk-bentuk distorsi di atas terjadi secara saling melengkapi. Sehingga memunculkan suatu model kapitalisme

yang sering disebut sebagai *cronnys capitalism* (kapitalisme perkoncoan) yang untuk memahaminya tidak mungkin bisa dilepaskan dari nama Soeharto, pengusaha orde baru yang secara oligarkis (bersama klik militernya dan sekelompok pengusaha cina serta didukung oleh para kaum teknokrat yang pragmatis) menguasai hampir seluruh lini kehidupan: sistem konstitusi dan heirarkhi birokrasi, badaya massa, tata cara social dan tata cara ekonomi nasional selama tiga dekade. Dalam wujud konkritnya bagi rakyat, kapitalisme perkoncoan gaya Shoeharto hádala kapitalisme yang bersembunyi di balik pembangunan sebagai ideologi (pembangunanisme), kapitalisme yang menunggangi jorgon-jargon *wishful thinking* demi kepentingan rakyat yang dalam praktiknya justru lebih banyak mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan kroni Soeharto.

Kapitalisme perkoncoan dengan kata lain adalah suatu bentuk kapitalisme yang mengalami distorsi oleh praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga yang muncul kemudian adalah sisi gelap kapitalisme seperti kartel (penguasaan produksi dan distribusi kayu hutan oleh Bob Hasan), oligopoli dan monopoli (cengkeh, semen dan terigu oleh Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono) serta pengaturan harga yang monopsonistik. Sifat-sifat yang meng-*embedded* kapitalisme di Indonesia ini pada gilirannya nanti terbukti membawa negara ini ke jurang crisis ekonomi dan crisis multi-faset yang berkepanjangan pada 1996.

Contoh paling monumental untuk memahami kapitalisme perkoncoan ini adalah melakukan studi kasus dengan menyoroti perilaku bisnis Bob Hasan (The Kian Seng), teman main golf Soeharto sekaligus mesin ekonomi

yamg menjalankan bisnis Soeharto. Bob Hasan merupakan personifikasi dari perselingkuhan antara bisnis (keluarga Cendana) dengan kekuasaan (hegemoni politik Soeharto), yang secara umum merugikan dan menghasilkan anak haram: kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*).

Bob Hasan adalah orang kepercayaan Soeharto sehingga posisi di dunia bisnis sangat kuat ; hampir tak ada yang bisa membendung sepak terjangnya, andaipun ada – misalnya seperti Imam Taufik melalui beberapa tender proyeknya – tetap akan dikalahkan. Demikian pula dalam kasus rebutan tambang emas Busang, kasus Freeport dan kebangkrutan Astra, Bob Hasan lah sang pemenangnya. Dengan Soeharto dibelakangnya maka siapapun yang melawan akan terpental.

Sekitar tahun 80-an, Apkindo (Asosiasi panel kayu Indonesia) yang mempunyai 130 perusahaan kayu sebagai anggotanya, begitu dikendalikan Bob langsung sukses besar mengatrol ekspor kayu lapis, sehingga Indonesia menjadi produsen kayu tropis terbesar dengan menguasai 80 % lebih pangsa pasar (Media Indonesia. 2 Juli 1995), meskipun hal itu dilakukan dengan strategi banting harga (*dumping*) (TEMPO, 3 Mei 1999). Namun tata-niaga lewat satu tangan ini semakin menampakkan sisi oligopolinya karena asosiasi menentukan harga jual, kuota dan tujuan ekspor bagi para anggotanya, ketika pasar lesu dan patokan harga tetap tinggi berakibat banyak anggota asosiasi bangkrut karena tak mampu membayar cicilan kredit. Ketika pada tahun 1985 delapan perusahaan kayu kepergok menurunkan harga di bawah harga yang ditetapkan, demi bisa berproduksi, langsung lisensi ekspor

perusahaan tersebut dibekukan selama 6 bulan. Anehnya praktik ini selalu dilegitimasi pemerintah.

Di samping mengharuskan harga tinggi juga dilakukan pungutan kepada anggota asosiasi. Dari setiap meter-kubik kayu yang di ekspor, Apkindo mengutip US$ 10 untuk promosi, US$ untuk agen Apkindo (Nippindo dan lainnya), US$ 2 untuk APHI di mana Bob Hasan menjadi pimpinannya dan US$ 2 untuk biaya sertifikat mutu. Berbagai pungutan ini masih ditambah asuransi 1 % dari total penjualan yang dibayarkan ke PT Asuransi Tugu Pratama milik Bob, ditambah ongkos angkut US$ 31/m3 yang disetor ke PT Karana Lines – milik Bob Hasan juga. Berdasarkan taksiran *Bussines Week* pada 1994, total pungutan yang dikumpulka Apkindo mencapai US$ 850 juta (SWA 13/XIV/1988). Hanya Bob lah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala bentuk iuran dari Apkindo, dan perusahaan Bob pula, yakni Grup Kalimanis, yang selalu diprioritaskan penjualannya. Ketika muncul kritikan dari public, khususnya masyarakat perkayuan Indonesia, di depan DPR menteri perdagangan Satrio Billyjudono berjanji untuk merevisinya, Namun beberapa waktu kemudian sang menteri dicopot dan departemennya digabung dengan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian dan Perdagangan ini pada susunan kabinet Soeharto berikutnya dipimpin oleh Bob Hasan.

Monopoli ekspor kayu juga dilakukan di luar negeri dengan mendirikan Nippindo (untuk pasar di Jepang), Indo Kor Panels Ltd. (di Korea Selatan), Celandine Co. Ltd. (untuk pasar Cina dan Taiwán), PT Fendi Indah (untuk Timur Tengah) dan Fendi World (untuk Singapura dan Eropa). Semua

digunakan sebagai bagian bisnis pribadinya. Dengan manuvernya ini, semua jalur langsung antara producen lokal dan pembeli internasional di bawah satu tangan Bob Hasan. Hasilnya si Raja Hutan ini menguasai 89 % pangsa pasar internacional dari total produk kayu lapis nasional. Keuntungan diperolehnya tidak saja dari berbagai pungutan dan ongkos pemasaran yang dikutipnya, tetapi juga dari selisih harga dengan menaikkan harga jual dari harga semula yang ditetapkan Apkindo (TEMPO, 3 mei 1999)

Kiprah Bob Hasan di bisnis perkayuan menjadi pintu masuk bagi kiprah bisnis kroni Soeharto, termasuk anak-anak Soeharto, untuk membawa sector kehutanan dan perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. Di samping menguasai pengusahaan hutan (HPH) seluas 2,263 juta Ha, juga pengusahaan tanaman industri (HPHTI) seluas 1,627 Ha perkebunan seluas 224.893 Ha dan kawasan hutan untuk kawasan industri, pemukiman dan wisata seluas 14.287 Ha. Dengan demikian total lahan yang dikuasai perusahaan anak-anak, menantu, cucu, kerabat dekat dan kroni Soeharto tersebut berjumlah 4,130 juta hektar dan di bawah kendali 65 buah perusahan milik mereka (sumber data : *Indonesia Corruption Watch*, Nopember 1999).

V.C.Korupsi Kaum Peranakan di Indonesia Dewasa Ini

Berbagai factor penyebab yang bisa disebut sebagai latar belakang melembaganya kultur korupsi di Indonesia adalah :

(1). Secara ekonomi terdapat *gap* yang terlalu besar antara *suplay* dan *demand* terhadap berbagai jasa dan pelayanan, adanya politik perijinan dan lesensi yang tidak transparan oleh instansi pemerintah, adanya *gap*

antara status social pegawai pemerintah sebagai "*ambtenaar*" dengan gaji yang relatif rendah dibanding dengan kelas menengah pengusaha yang sedang tumbuh serta adanya asumsi yang keliru tentang konsep "koneksi" di tingkat hubungan social. Konsep koneksi ini adalah manifestasi dari ajaran Cina tentang hubungan personal (*guang shi*).

(2). Secara politik karena tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk secara sungggguh-sungguh memberantas praktek korupsi, bahkan ditengarai korupsi menjadi salah satu kiat dalam mempertahankan *status quo* dalam bentuk " manajemen bagi-bagi rejeki".

(3). Secara hukum karena adanya standar ganda dalam penerapan hukum dan adanya mafia peradilan dimana hakim, jaksa dan pembela adalah person-person yang bisa dibeli oleh pemilik uang (modal). Kasus Artalya adalah contoh paling aktual dimana uang milik koruptor BLBI Samsul Nursalim mampu membeli integritas jaksa Urip Trigunawan.

(4). Secara kelembagaan karena terlalu banyaknya peraturan, ketidakjelasan prosedur, lemahnya moralitas pimpinan dan terutama lemahnya (dilemahkannya) control masyarakat, sangat membuka peluang bagi dilakukannya suap, *bribery* dan jual-beli peraturan (peraturan bisa diakali dngan menyerahkan sejumlah uang).

Baharuddin Lopa (mantan Sekjen Komnas HAM, dan Jaksa Agung) dalam tulisannya di SWA (1997) menyebut adanya dua sasaran korupsi ; yakni korupsi material (material coruruption) dan korupsi politik (*political corruption*) yang keduanya biasanya berhubungan. Deskripsi di atas lebih menunjuk pada sasaran korupsi yang pertama (suap-menyuap dan

manipulasi dana). Korupsi politik adalah manipulasi di bidang politik seperti manipulasi perhitungan suara hasil pemilu. Dalam banyak kasus terjadi korupsi ganda, korupsi material sekaligus korupsi pilitik. Penyediaan dana dari sejumlah pengusaha (terutama Cina, untuk Presiden *incumbent* oleh Murdaya Poo dan bos PT Samator) untuk membiayai pemilu sebuah partai tertentu dengan jumlah yang melebihi ketentuan bisa dikategorikan korupsi ganda ini. Demikian pula jika seorang penguasa (presiden) demi untuk mempertahankan kekuasaannya atau memperpanjang masa jabatannya membuat peraturan-peraturan yang tendensinya seperti di alas, misalnya melakukan monopoli sejumlah kegiatan perdagangan (menguntungkan kroninya) — seperti yang dilakukan Marcos dan Soeharto — adalah juga termasuk korupsi ganda Inl. Praktik ini ditengarai tetap berjalan hingga sekarang dalam setiap kekuasaan, hanya orangnya (penguasa dan pengusahanya) yang berbeda. Sistem korupsinya tetap sama.

Korupsi yang berkaitan dengan motif-motif politik ini biasanya dipermudah dengan menempuh jalan pintas, yakni menumbuhkan sistem monopoli yang memudahkan seorang pengusaha tertentu memperoleh keuntungan untuk rnengumpulkan dana bagi tujuan-tujuan politik partai yang ditunjuk patronnya. Sedangkan setiap sistem monopoli senantiasa menyebabkan sekurang-kurangnya dua hal, yakni :

Pertama, harga-harga kebutuhan rakyat akan makin meningkat karena perusahaan yang memperoleh hak monopoli leluasa mendekte pasar dan menaikkan harga disebabkan tidak adanya saingan yang berarti. Dalam kondisi ini keuntungan yang tidak terbatas akibat monopoli ini hanya

dinikmati oleh perusahaan-perusahaan milik kroni penguasa saja. Berbagai komoditi yang dimonopoli oleh kroni Orde Ban' misalnya, pengadaan terigu, semen, gula, cengkeh, minyak dan kayu.

Kedua, secara dialektis, makin lama keadaan tersebut berlangsung, makin terancam pula posisi pemerintah yang memberi hak-hak istimewa itu. Karena akan menumbuhkan kesadaran politik pada pengusaha-pengusaha menengah dan kecil yang merasa dirugikan dengan adanya sistem monopoli itu bersama rakyat yang semakin menderita karena harga-harga tinggi yang ditentukan secara sepihak, bersatu untuk menentang kebijakan tersebut dan menggugat praktek korupsi dan kolusi yang ada; gerakan reformasi tahun 1997 di Indonesia adalah contoh paling konkrit mengenai hal itu.

Pada saat ini, korupsi model di atas tidak selalu melibatkan partai politik. Jika seorang (kelompok) yang berkuasa menganggap partai tidak siap atau terlalu lemah untuk menjalankan program pemenangan Pemilu presiden, maka oleh penguasa dan kelompoknya ini akan dibentuk satu atau beberapa team sukses yang bekerja melalui mekanismenya sendiri, yang seringkali tidak transparan, untuk memenangkan Pemilu presiden. Salah satu caranya adalah dengan menggelontor 'sembako' kepada masyarakat lapisan bawah dengan tujuan 'membeli' suara mereka dalam Pemilu presiden. Modal bagi bekerjanya team ini serta pendistribusian barang termaksud pastilah membutuhkan modal yang besar. Modal ini diperoleh dari pengusaha-pengusaha Cina, baik perorangan maupun kelompok organisasional, yang tentu saja (lazimnya prinsip dagang) pengeluaran modal ini didasari kepentingan bisnis pengusaha-pengusaha Cina tersebut manakala tokoh

politik yang mereka dukung memenangkan Pemilu presiden. Tidak jarang seorang pengusaha yang sama 'membotohi' atau 'ngopeni' beberapa calon berbeda yang berpeluang menang. Yang memprihatinkan lagi, modal yang sudah dikeluarkan tersebut pada masanya akan dihitung sebagai 'modal usaha' yang dicatat sebagai biaya produksi perusahaannya. Akibatnya balas budi yang harus didapat dari calon yang didukungnya haruslah sepadan dengan modal yang telah dikeluarkan ditambah bunganya.

Sedangkan Kolusi pada mulanva adalah praktek bisnis yang terjalin melalui hubungan yang saling menguntungkan antara cukong (umumnya pengusaha Cina) dengan para pejabat pemerintah (umumnya yang berlatarbelakang militer). Sebagai contoh paten, mulai soeharto di pucuk pimpinan, para jendral di lingkungan inti istana, Pangdam, Gubernur, hingga pejabat pemerintah tingkat bawah. Ditengarai Soeharto telah menjalankan perilaku kolutif sejak ia masih menjadi Pangdam Divisi Diponegoro Jawa Tengah di masa pemerintahan Soekarno. Pola hubungan ini tetap diwariskan sepanjang ia berkuasa, sehingga menjadi pola bahwa tiap penguasa baik di pusat maupun daerah memiliki jaringan kolusi dengan pengusaha-pengusaha Cina yang berkepentingan dengan bisnisnya atau peluang bisnis di daerah tersebut di masa datang.

Sistem ekonomi yang terjalin melalui pola hubungan "cukongisme" merupakan hubungan timbal-balik. Pengusaha Cina memiliki uang, sedangkan para pejabat pemerintah mengandalkan diri pada pemberian proteksi dan fasilitas melalui pengaruh kekuasaan yang mereka miliki. Sebagai imbalan atas pemberian fasilitas dana kepada patron politiknya,

para pengusaha Cina tersebut mendapat perlindungan politik dan keamanan, bebas dari beban pajak tertentu, memperoleh fasilitas dana segar dari perbankkan karena direkomendasi, maupun akses terhadap lisensi perdagangan.

Berbekal kolusi' bisnis yang terjalin dengan para birokrat pemerintah, para konnglomerat dan pengusaha Cina pada umumnya akhirnya memperoleh akses yang cukup mapan dalam memperoleh kredit, informasi pasar maupun kontrak-kontrak dengan fihak investor luar negeri. Maka muncullah nama-nama konglomerat pribumi yang besar lewat fasilitas penguasa, seperti Liem Sioe Liong, Eka Cipta Wijaya, Prayoga Pangestu, Mohtar Riyadi, Tan Siong Kie, The Nin King, Bob Hasan dan Suhargo Gondokusumo. Setiap masa kekuasaan seseorang bisa jadi nama-nama pengusaha Cina yang mendukungnya berubah ataupun tetap sama. Karena bagi pengusaha Cina, siapapun yang jadi penguasa di Indonesia tidak masalah, yang penting bagi mereka adalah orientasi politik-ekonominya, apakah menguntungkan ataukah sebaliknya bagi kepentingan bisnis mereka. Dalam situasi politik-ekonomi yang tidak kondusif dan beresiko bagi kepentingan bisnis mereka, maka melarikan modal ke luar negeri, terutama ke negeri Cina atau negara-negara Asia Tenggara yang ekonominya didominasi Cina perantauan adalah pilihan pertama yang akan dilakukan. Menjual saham dan trik-trik bisnis lainnya baru merupakan alternatif berikutnya.

Meskipun sebagai kelompok minoritas mereka tidak memiliki akses politik yang berarti, namun berkat fasilitas ekonorni yang begitu besar pada

gilirannya mereka punya pengaruh politik yang cukup besar, tidak hanya mengatur arah kebijakan ekonomi saja; bahkan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kebijakan politik dalam hal-hal tertentu, misalnya kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan negara Singapura atau RRC.

V.D.Analisis Strukturasi Terhadap Kroniisme

Tulisan ini hendak mengkaji sisi-sisi yang disebut di atas, dan menegaskan (berdasarkan penelitian terdahulu) bahwa mengguritanya korupsi di Indonesia – khususnya yang berhubungan dengan perdagangan, tender proyek-proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan masyarakat, termasuk lembaga perijinan -- sama sekali tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kuatnya pengaruh kaum Cina peranakan sepanjang sejarah bangsa Indonesia sejak masa kolonial hingga pasca reformasi sekarang. Oleh sebab itu tulisan ini mengambil tema yang berkaitan dengan kapitalisme yang dipraktikkan oleh kaum Cina peranakan, juga atas dasar kerangka teoritik yang tidak memisahkan agen yang menciptakan kultur dengan struktur yang membingkai perilaku social dalam hubungan social yang lebih besar (strukturasi) dan menciptakan pola-pola kebiasaan (habituasi).

Sehingga dengan demikian, tulisan ini menghubungkan kultur yang melatarbelakangi perilaku komunitas Cina peranakan (atau Cina perantauan, atau Tionghoa, atau "Chokin" dalam bahasa gaul) di Indonesia, dengan struktur masyarakat Indonesia yang lebih luas, yang di dalamnya terkandung berbagai nilai budaya dan etos social masyarakat Indonesia yang majemuk, yang dalam periode sejarah panjang pra-kolonial, kolonial dan pasca

kemerdekaan, telah bertaut- berkelindan membentuk 'mozaik budaya' Indonesia kontemporer dan membangun 'konstruksi social' *nation-state* Indonesia kekinian.

Telah diketahui bersama bahwa domain struktur masyarakat Indonesia kekinian, yakni yang terkonsentrasi pada kekuasaan negara dan sistem distribusinya yang di *embedded* oleh kepentingan ekonomi dan bisnis (secara Individual maupun kelompok) telah menciptakan sistem perpolitikan, system perekonomian dan perdagangan, mekanisme peradilan dan kinerja birokrasi yang rentan korupsi, cenderung lebih dominan dibanding domain kultur. Dalam proses terjadinya korupsi, kultur lebih berfungsi sebagai katalisator sosial yang menumbuh-suburkan perilaku koruptif, sebagai media yang cenderung permisif terhadap praktik-praktik korupsi. Hal yang terakhir disebut bisa dirujuk dalam studi-studi sejarawan dan sosiolog Belanda, seperti Wertheim dan Furnivall.

Studi Furnivall (1958) menegaskan hal tersebut. Sejak tahun 1800-an perusahaan Belanda, *Dutch East India Company* atau Kongsi Dagang Hindia Timur yang sering disebut dengan VOC (*Vereniging Ost Indische Compagnie*) atau 'Kompeni', telah memberikan contoh praktik korupsi. Pegawai rendahan VOC digaji sangat sedikit dibanding atasan-atasan mereka yang dominan orang Belanda. Status sebagai pegawai VOC yang gengsinya di atas rata-rata pribumi, meskipun bergaji rendah, menuntut (memaksa) mereka bergaya hidup seperti atasan mereka. Jalan yang ditempuh adalah dengan korupsi dengan melakukan pemalsuan pajak dan cukai, pungutan-pungutan liar kepada kaum pribumi, dan menyogok atasan agar mendapat kenaikan

pangkat atau kedudukan yang lebih baik, dan sebagainya, sehingga kaum pribumi yang menjadi pegawai pemerintah kolonial dan para pamong praja dan kaum priyayi, terbiasa dan mencontoh perilaku tersebut.

Situasi kultural semacam ini membentuk etos kerja yang rentan korupsi dan secara sinergis lalu berpadu dengan perilaku dagang komunitas Cina, yang didasari oleh prinsip '*guangshi*' (hubungan personal, koneksi), yang kemudian berkembang secara negative sebagai praktik-praktik kolusi. Praktik-praktik pemberian uang terima kasih, uang administrasi dan balas jasa atas selesainya suatu urusan kemudian menjadi sumber terjadinya berbagai kasus gratifikasi, yang akibat langsungnya adalah pengistimewaan (perlakuan secara khusus) kepada para pengusaha tertentu oleh pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan.

Keistimewaan perilaku ekonomi etnis China yang pertama adalah terletak pada kuatnya sistem jaringan kerja. Walaupun demikian, sikap kompetetif antara mereka tetap terpelihara. Hal ini semakin memperkuat kinerja bisnis di kalangan mereka. Bahkan saat terjadi krisis ataupun munculnya tantangan besar, mereka akan saling bekerjasama. Oleh sebab itu, bisnis keluarga menjadi salah satu ciri jaringan kerja yang mereka bentuk. Demikian pula di Indonesia, usaha kecil sampai perusahaan besar etnis China di Indonesia banyak yang dikelola sebagai usaha keluarga, contohnya Salim Group, Khong Huan, PT Cap Orang Tua, perusahaan jamu 'Jago', perusahaan jamu 'Air Mancur', dan lain-lain.

Di Indonesia jaringan bisnis China Perantauan berkembang pesat. Menurut Pusat Data Bisnis Indonesia, pada tahun 1994 total asset dari 300

konglomerat mencapai Rp 271,887 triliun, diperkirakan 78,3 % atau senilai Rp 212.832 triliun merupakan asset pengusaha non-pribumi (China, India, dan Arab). Sementara pengusaha pribumi menguasai asset sekitar 17,9% atau senilai 48,674 triliun, sisanya 3,8 % merupakan usaha asimilasi. Yang unik, jaringan bisnis tersebut sebagian besar sudah menjadi warga negara tempat mereka lahir dan/atau berdomisili serta sudah membaur dengan masyarakat pribumi setempat (PDBI, 1997).

Secara kuantitatif, etnik China merupakan minoritas di tengah kemajemukan etnik di Indonesia. Pada tahun 1961, diperkirakan ada sekitar 2,45 juta jiwa etnis China atau sekitar 2,8% dari total penduduk Indonesia. Dari segi tempat tinggal mereka, ada perbedaan pola sebaran antar berbagai pulau di Indonesia. Khusus untuk Jawa dan Madura, presentase terbesar (78,4 persen) bertempat tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan sisanya (21,6 persen) bertempat tinggal di pedesaan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar etnis China di Jawa dan Madura berkegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dan industri perkotaan. Walaupun demikian, secara kualitatif, persoalan yang dianggap telah ditimbulkan dengan keberadaan etnis China ini tidak bisa disebut kecil. Bahkan diindikasikan minoritas China telah menguasai 70 sampai 80 persen perekonomian Indonesia (Adidjondro, 2002: 16).

Karakteristik lain yang dimiliki etnis China di Indonesia adalah kemauan kerja kerasnya dan kebiasaan hidup hemat. Mereka mampu bekerja dalam waktu yang panjang dan jarang beristirahat kecuali untuk hari besar mereka. Senantiasa menghasilkan uang, sudah menjadi kebiasaan sekaligus

kesenangan mereka. Prof. Wang Gung Wu menegaskan bahwa sikap orang China mengarah pada kemakmuran (Wang dan Cushman, 1991: 30). Salah satu kesamaan karakteristik antara etnis China di Indonesia dengan masyarakat pribumi berkaitan dengan konflik adalah sama-sama menyukai penyelesaian perbedaan melalui negosisasi, dibanding pemecahan konflik secara formal. Hal ini terlihat dari kentalnya jaringan kerja yang telah menjadi kebiasaan etnis China, tentunya kondisi ini menjawab mengapa '*guang shi*' (kontak personal) menjadi penting dalam perilaku ekonomi mereka.

Korupsi telah menjadi masalah laten di Indonesia, sebab korupsi yang terjadi dan berkembang sepanjang Orde Baru berkuasa bukan lagi sekedar motivasi individual melanikan sebuah korupsi yang melembaga (*institutionalized corruption*).atau korupsi yang bersifat sistematik (*sistematic Corruption*). Perilaku korupsi yang pada mulanya merupakan anti nilai setelah melalui dialektika budaya - merujuk Berger, yakni mengalami internalisasi, subyektivasi dan obyektivasi – telah menjadi nilai, menjadi sesuatu yang dijadikan rujukan karena telah menjadi bagian dari kultur yang massif. Jika seseorang tidak melakukan hal yang sama justru menjadi aneh bagi lingkungan sosialnya. Pada kenyataannya korupsi dalam berbagai bentuknya telah menggejala mulai dari tukang parkir, birokrasi tingkat desa hinggá di pusat kekuasaan.

Pengertian korupsi meliputi wilayah dataran yang sangat luas dan lebih dari sekedar "menyogok dengan uang", melainkan juga hadiah (*gift*, yang kini sering disebut gratifikasi), peluang investasi, imbalan-imbalan *nonpecuniary* seperti kenikmatan seksual, kesempatan menikmati hari tua sebagai manajer

atau menjadi komisaris perusahaan setelah pensiun, memasukkan sanak famili atau kenalan ke dalam struktur organisasi pemerintahan atau perusahaan dan sebagainya.

Praktek korupsi, kolusi dan nepotime dalam kapitalisme perkoncoan secara ekonomi menciptakan *high cost economy*, yang bagi rakyat terasakan pada tingginya harga-harga komoditas untuk berbagai keperluan sehari-hari, kualitas produk yang rendah (*inferior produc*) dan upah buruh yang tetap rendah. Di samping itu juga memunculkan efek negatif berikut: biaya investasi dan resiko berusaha menjadi besar, sulitnya mencari peluang berusaha sebab hierarkhi distribusi barang dan jasa serta peluang usaha dan industri dari hulu ke hilir telah dirambah para kroni penguasa; tidak adanya ruang sosial *(social space)* untuk bersaing secara sehat baik di bidang ekonomi sebab ketiadaan koneksi dan rekonendasi; mampetnya saluran-saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi rakyat karena institusi politik yang telah terkooptasi oleh negara, sementara kesenjangan yang semakin melebar antara yang miskin dan yang kaya semakin melukai rasa keadilan rakyat banyak. Sedangkan secara nasional, KKN menyebabkan lemahnya daya saing bagi pengusaha nasional yang dibutuhkan untuk berkompetisi di tingkat global, serta mengakibatkan hilangnya sunber pendapatan negara karena tidak bisa dikumpulkan secara benar.

Tabel II. Modus Korupsi

No.	Lembaga	Momentus	Modus	Pelaku
1	Ekskutif	Penyusunan APBD (RASK/DASK)	- Memberikan uang kepada	Bupati atau Walikota dan DPRD

			legislative dengan tujuan agar dapat mempermudah persetujuan dewan - Terjadi persekongkolan antara ekskutif dengan legislative untuk menyusun anggaran baik yang dimark up maupun targetnya dimark down	
2		Laporan pertanggungjawaban	- Sama seperti penyusunan anggaran - Ada komitmen-komitmen tertentu untuk saling menguntungkan lewat bagi-bagi proyek pembangunan	Sama seperti penyusunan anggaran
3		Proses perizinan	- Memberikan izin dengan syarat yang memberatkan - Memberikan izin pada tempat yang dilarang	Dinas perijinan dengan pelaku usaha/individu

			secara kolutif	
4		Rekruitmen pegawai	- Memeras peserta tes pegawai agar memberikan uang atau barang mewah agar dapat diterima sebagai pegawai - Mendahulukan keluarga,teman atau titipan orang-orang tertentu	Pejabat di lingkungan pemerintahan bersama calon pegawai
5	legislatif	Pemilihan kepala daerah	- membuat kontrak dengan salah satu kadidat dengan kompensasi tertentu (money politik) - Banyak yang menjadi tim sukses pemenangan dengan melakukan konspirasi tertentu dengan para pemodal	Legislative bersama calon kepala daerah
6		- Penyusunan dan penetapan kebijakan	Money politik, suap, sogok	Legislative bersama kepala daerah dan pengusaha

		(perda) maupun fungsi pengawasannya - Penyusunan dan penetapan anggaran - LPJ - PANSUS - Pengusulan proyek - Pelaksanaan tender pembangunan		
7	Penegak hukum	Pembuatan SIM	Membeyar melebihi uanng administrasi yang semestinya, dengan kompensasi tidak mengikuti tes	Polisi dengan pencari SIM
8		Penanganan dalam hal pelanggaran/kejahatan hukum	Korban diinterogasi dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau meminta uang tebusan	Polisi/jaksa/pengacara dan korban
9		- Pembuatan berita acara penuntutan - Jual beli	- Korban diperas dengan ancaman tuntutan hukuman yang berat - Pemberian uang damai pada aparat	Jaksa/polisi/pengacara dan korban
10		Putusan pengadilan	Hakim akan memutus perkara dengan hukkuman ringan atau bebas pada	Hakim,panitera, pengacara dan korban (biasanya ada yang bertindak

			korban yang telah member uang sogok atau suap, atau berbertuk materi lainnya seperti barang mewah, dll.	sebagai kurir).
11		Penghilangan barang bukti kejahatan	Barang bukti yang akan dijadikan pembuktian pengadilan disusutkan sedemikian rupa dengan kompensasi hukuman ringan atau bahkan barang buktinya dihilangkan sama sekali	Polisi,jaksa dan pelaku kejahatan
12		Layanan di lenbaga pemasyarakatan	Sipir memerankan sedemikian rupa dan bertugas memilah-milah narapidana sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi napi dan memeras keluarga napi saat berkunjung	Sipir,keluarga korban, pengunjung.
13	Sector Swasta	Pemilihan pejabat public daaerah (Bupati/Walikota)	Pengusaha memainkan perannya untuk memenangkan salah satu calon Bupati/Walikota dengan membiayai aktifis politiknya baik yang berbentuk money politik maupun pemberian upeti	Pengusaha DPRD, calon Wlikota ,media masa

			kepada etit-elit ppolitik untuk mempengaruhi opini public	
14		Proses perizinan	Pemberian izin yang dibuat Pemda dimanfaatkan pengusaha untuk mendapatkan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengusaha, Pemda, pejabat terkait(Dinas perizinan)
15		Pemenangan tender proyek	Pengusaha memberikan fasilitas kepada pejabat public dengan motif sogok atau suap untuk memenangkan tender proyek dengan membayar sejumlah *fee*	Pengusaha Pemda(dinas pekerjaan umum)
16		Pemenangan kasus di pengadilan	Pengacara mempengaruhi keputusan hakim dengan member upeti atau memilih hakim-hakim yang dapat disuap di pengadilan	Pengacara, hakim dengan panitera
17		Kasus-kasus yang meklibatkan pejabat public	Wartawan mendatangi pejabat public untuk memuat atau tidak temuan kasus yang mendiskriditkan pejabat public	Wartawan,pimpinan redaksi pejabat public
18		Peristiwa politik daerah	Ormas / Orsospol/ Tokoh masyarakat memanfaatkan	Orma,Orsospol,Tokoh masyarakat, pejabat public

			peran-peran yang dimiliki dengan tujuan politis pemilihan kepala daerah atau penentuan kebijakan public lainnya. Penenttuan Perda, Perbup/Perwali, dll	
19		Kasus yang menimpa pajabat public	LSM yang menpunyai data-data cacat pejabat public , mendatangi pejabat public *untuk menjual* data tersebut atau memeras pejabat dimaksud untuk kepentingan tertentu	LSM, pejabat publik

(Sumber: Kurniawan, Peta Korupsi di Daerah, 2006: 64-67)

Korupsi akan benar-benar menjadi penyakit masyarakat dan berfungsi negatif bila :

1. Transaksi uang suap yang terus menerus dalam masyarakat sedang berkembang yang melibatkan ratusan ribu dolar mllik dunia usaha, menjadi beban yang harus ditanggung oleh publik, karena biaya uang sogok pada akhirnya akan berjalan terus menuju konsumen.
2. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu uang sogok membantu meningkatkan efisiensi, namun secara keseluruhan korupsi cenderung menurunkan efisiensi kepegawaian.

3. Dalam prakteknya, korupsi bersifat memeras merupakan fenomena yang menjalar dengan sangat cepat yang membawa keteledoran dan ketidakefisienan. Kebiasaan berbuat sesuatu yang illegal dan bersifat subversive akan beralih pada lingkaran yang paling luas.
4. Korupsi merongrong respek bagi kewenangan yang ada, cenderung mengerogoti pemerintahan yang didukung oleh publik dan mengasingkan kepatuhan publik pada tujuan pemerintahan.

Berikut ini adalah berbagai bentuk praktik korupsi yang sering terjadi dan dilakukan dalam berbagai bidang kemasyarakatan baik di kantor-kantor pemerintahan maupun di luar bidang tersebut.

- Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada ada,

- Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan,

- Mark up anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam UU,

- Pengalokasian anggaran yang sebatulnya sama dengan anggaran lainnya (duplikasi anggaran),

- Pembuatan anggaran tanpa rincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi,

- Menghilangkan pos anggaran,

- Pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi dalam bentuk uang,

- Modus kedelapan, bantuan berbentuk uang diubah berbentuk barang dan menggurangi spesifikasinya,

- Pengadaan barang dan jasa dengan cara di mark up harga barang dan jasa dari harga pasar dan kolusi dengan kontraktor,

- Penghapusan inventaris dan asset Negara dengan cara memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi,

- Pemotongan bantuan social atau subsidi, (sekolah, panti asuhan, Pesantren dll) melalui cara dengan menyunat dana bantuan yang dilakukan di setiap tingkatan meja,

-Penyelewengan dana proyek dengan cara mengambil dana proyek diluar ketentuan dan memotong dana proyek,

- Proyek fisik fiktif dalam laporan tercantum tapi di lapangan nihil tidak ada proyek,

- Pungli dalam penerimaan CPNS, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pension dengan cara memungut biaya tambahan diluar ketentuan resmi,

- Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, restribusi dan iuran dari jumlah riil penerima pajak tidak dilaporkan serta penetttapan target penerima pajak lebih, rendah dari penerimaan riil, dan

- Manipulasi proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama) dengan cara mark up nilai proyek dan pungutan komisi tidak resmi.

VI.KESIMPULAN DAN SARAN

VI.A.Kesimpulan

Faktor-faktor kultural yang membuka peluang dan menjadi katalisator sosial maraknya perilaku korupsi terutama adalah primordialisme dan sistem patronase yang dibawa oleh berbagai budaya etnis yang telah lama ada di Indonesia, termasuk budaya Cina. Ketika primordialisme dan patronase tersebut tidak mampu ditransformasikan dalam tata kehidupan dunia modern secara lebih cerdas, maka akan memunculkan perilaku yang bersifat kolektif. Istilah "budaya korupsi" adalah *side effect* demi kehidupan modern.

Budaya Cina yang dipraktikkan oleh komunitas Cina peranakan atau Cina perantauan telah berperan aktif menumbuh-suburkan korupsi di negeri ini sepanjang sejarahnya semenjak masa kolonialisme. Hal ini berkait dengan posisi komunitas ini yang meskipun terpinggirkan secara sosial namun dominan di dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan ekonomi pada umumnya. Dikuasainya lebih dan 70 % asset ekonomi nasional di bidang distribusi dan pengadaan barang dan jasa, menjadi pintu masuk yang sangat terbuka bagi internalisasi etos kerja, etika berdagang serta trik-trik berdagang yang diinsprasikan oleh ajaran-ajaran Konfucianisme, Taoisme dan terutama Sun Tzu, ditambah dengan etos-baru (materialism kontemporer Cina) tentang hubungan kekayaan dengan kemuliaan dari negeri Cina modern.

Berbagai budaya dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara mempunyai potensi yang sama memunculkan fenomena sosial yang kemudian diberi lebel "budaya korupsi", tergantung pada luas dan tidaknya

dominasi budaya etnis tadi dalam "tata pergaulan" kekuasaan dan ekonomi. Persentuhan budaya yang sudah lama terjadi sepanjang sejarah pra-republik hingga masa Indonesia kontemporer secara signifikan memunculkan dominasi etika dagang Cina dalam berbagai bentuk pertukaran (kapitalisme) di Indonesia.

Kapitalisme perkoncoan adalah bentuk *'erzats capitalism'* (kapitalisme semu) yang dominan dalam praktik kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme perkoncoan yang didominasi pengusaha Cina peranakan menjadi model *mainstream* dalam praktik kapitalisme di Indonesia yang di dalamnya instrinsik terkandung praktik-praktik yang rentan korupsi, sebagai akibat tak langsung maupun langsung dari ajaran *`guang shi'* di bidang perdagangan.

Telah diketahui di atas bahwa domain struktur, yakni konsentrasi kekuasaan negara dan sistem distribusinya yang di *embedded* oleh kepentingan ekonomi dan bisnis (secara Individual maupun kelompok) telah menciptakan sistem perpolitikan, mekanisme peradilan dan kinerja birokrasi yang rentan korupsi, lebih dominan dibanding ddomain kultur. Dalam proses terjadinya korupsi, kultur lebih berfimgsi sebagai katalisator sosial yang menumbuh-suburkan perilaku koruptif. Asumsinya manusia adalah aktor sosial, yang menafsirkan lingkungan dan komunitasnya serta mengarahkan tindakan mereka dengan cara bermakna bagi mereka. Dengan begitu mereka memberi sumbangan kepada pembentukan realitas social. Manusia hidup dalam suatu dunia signifikan simbolik, menafsirkan dan melibatkan diri dalarn hubungan yang bermakna dengan dunia tersebut. Manusia adalah person yang mempunyai kemampuan untuk menafsirkan

tidak sekedar beradaptasi, tetapi menciptakan perannya di tengah komunitas dan masyarakatnya.

Gagasan mengenai bagaimana sifat manusia dan sifat realitas adalah saling berhubungan. Pendekatan obyektif sangat menekankan lingkungan sebagai suatu faktor penentu dalam menjelaskan perilaku manusia. Manusia dibentuk oleh lingkungan, dan keberhasilan serta kelangsungan hidup mereka bergantung pada seberapa baik mereka beradaptasi dengan realitas nyata. Sumbangan penting proses adaptif ini adalah mendefinisikan lingkungan secara layak dan memenuhi persyaratannya. Karena lingkungan dan organisasi mempunyai struktur penting untuk mencocokkan keduanya, sehingga lingkungan konkret eksis secara independen dari tindakan manusia. Manusia hidup dalam dunia simbolik, dan lingkungan simbolik itu berubah serta dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Manusia mencipta, memelihara, dan memutuskan tentang realitas melalui penggunaan simbol. Manusia tidak hanya merespons dan beradaptasi dengan apa yang ada di luar sana. Mereka menciptakan lingkungan dan berpartisipasi dalam proses sosial penciptaan itu. Bagian besar tantangan manusia adalah mengenal dan beradaptasi dengan proses sosial itu sendiri.

Dalam perspektif strukturasi, aspek subyektif dan obyektif (agen dan stntktur) bukan lagi suatu dualisme seperti pada teori-teori terdahulu, melainkan sebagai dualitas (satu sama yang lain bersifat saling mengandaikan). Seperti yang dikatakan Barnstein bahwa tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektis dan saling mempengaruhi antara agen dan struktur (Barnstein, 1989: 23). Dualisme

pelaku-struktur yang dominan pada studi ilmu sosial, misalnya fungsionalisme Talcott Parsons yang menekankan fungsi sosial yang menuntut pelaku, dan Marxisme yang menunjuk pada struktur proses produksi yang mengekang kapasitas beban individu, menjelaskan strukturalisme-fungsionalisme yang memenangkan struktur di atas pelaku. Dualisme tersebut selalu gagal memberi penjelasan secara memadai karena selalu jatuh pada salah satu ekstrim.

Menepis dualisme (pertentangan), Giddens mengajukan gagasan dualitas (timbal balik) antara pelaku-struktur. Bersama sentralitas waktu dan ruang, dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur saling mengandaikan. Struktur memandang bahwa masyarakat manusia atau system-sistem sosial tidak akan ada tanpa agensi manusia, namun bukan berarti actor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial, actor-actor memproduksi atau mengubalmya dengan jalan menata kembali apa yang ada dalam kontinuitas praktis (Giddens 2004).

Kompleksitas pemikiran Giddens menempatkan Teori Strukturasi pada tingkat pelaku individu dalam masyarakat (praktik-praktik sosial) yang berlangsung terus menerus. Konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem. Secara progresif dielaborasi pada kesalinghubungan antara konsep-konsep tersebut, atau kesaling-tergantungan antara struktur dan tindakan. Struktur memungkinkan adanya tindakan. Ia merupakan sarana bagi tindakan, tetapi pada saat yang sama struktur hanya bisa direproduksi di dalam dan melalui tindakan. Giddens menyebutkan sebagai dualitas struktur (*duality of structure*).

Dualisme individu masyarakat yang juga sentral dalam teori ilmu-ilmu sosial, memunculkan pertanyaan sebagaimana individu-individu pada tingkat tertentu bertindak secara terorganisasi tanpa saling menyikut. Dalam terminologi teori strukturasi, persoalan ini berada di bawah judul Integrasi Sosial (*Sosial Integration*). Terinspirasi oleh teori Erving Goofman, Giddens mendefinisikan masyarakat sebagai penjumpaan antar individu yang terus menerus. Perjumpaan diatur oleh mekanisme-mekanisme dualitas pelaku dan stuktur. Kemudian dengan memakai teori waktu geografi Hagerstrand, Giddens menerangkan bahwa perjumpaan terjadi karena konvergensi waktu ruang dan mobilisasi waktu-ruang merupakan poros eksistensi masyarakat. Jadi praktik-praktik sosial dianggap sebagai basis yang melandasi keberadaan pelaku dan masyarakat. Giddens menyebutkan rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem yang diawali dengan memandang praktik-praktik sosial yang tentu berlangsung sebagai analisis penting. Menurut Giddens, manusia selalu mempunyai ide tentang dunia social, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya, clan tentang kondisi kehidupannya. Melalui idenya itu manusia masuk ke dalam dunia sambil mempunyai niat untuk mempengaruhi dan mengubahnya. Giddens juga menambahkan bahwa struktur bukanlah benda melainkan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial (Giddens: 1984). Selanjutnya ia mengatakan bahwa aktifitas sosial yang melalui hubungan antara agen-struktur bukan dilakukan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan berulang-ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai actor. Di

dalam dan melalui aktifitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan itu berlangsung (Giddens 1984).

Dalam konteks perilaku korupsi yang menggejala di Indonesia, tidaklah terjadi begitu saja karena struktur yang "mengharuskan" begitu, tetapi struktur memberi ruang bagi terjadinya praktik korupsi dan para agen yang melakukannya secara terus-menerus dalam rentang waktu yang panjang. Dalam aktifitasnya tersebut, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik-praktik korupsi berlangsung (terkondisikan). Dengan demikian struktur bukanlah realitas yang berada di luar pelaku (seperti dipahami oleh Durkheim dan diteruskan oleh strukturalisme), struktur adalah aturan dari sumber daya (*rules and resources*) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi palaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial. Sifatnya constraining dan enabling dari struktur bisa direfleksikan dari sisi agen sebagai berikut:

Pertama, semua manusia merupakan agen-agen berpengetahuan luas. Maksudnya, semua actor banyak mengetahui kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi atas apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sebelum dan sesudah melakukan praktik korupsi setiap orang sebenarnya mengetahui baik atau buruknya tindakan tersebut. Akan tetapi rutinitas mengatur kesadaran diskursif yang ada. *Kedua,* pengetahuan actor-actor manusia di satu sisi selalu dibatasi oleh kondisi yang tak disadari dan di sisi lain oleh kondisi yang tak dinyatakan konsekuensi-konsekuensi yang tak

diinginkan dari tindakan tersebut. *Ketiga,* kajian terhadap kehidupan keseharian bersifat integral dengan menggunakan analisis reproduksi praktik-praktik yang dilembagakan. Dalam hal perilaku korupsi masing-masing individu mengacu pada praktik-praktik korupsi yang melembaga dalam masyarakatnya, menirunya sebagai sebuah kewajaran. Dalam konteks Indonesia bahkan menjadi keharusan sosial, sehingga menjadi kegiatan rutin keseharian. *Keempat,* kegiatan rutin yang secara psikologis berhubungan dengan upaya meminimalkan sumber kecemasan tak sadar, merupakan bentuk utama aktifitas sosial keseharian. Meskipun terdapat kecemasan dari masing-masing individu terhadap konsekuensi perbuatan korupsi, tetapi menjadi tidak disadari sepanjang struktur yang ada tidak berubah, yakni tetap memberi peluang bagi praktik-praktik korupsi tersebut. Dalam hal praktik-praktik korupsi rutinitas tindakan atmu praktik suap-menyuap kita pada akhirnya akan membentuk struktur KKN di Indonesia. Pada gilirannnya, tentu saja banyak tindakan kita untuk menyelesaikan masalah tidak mungkin terjadi tanpa "menampilkan" (re-enacting) skemata KKN yang sudah merasuki semakin banyak tindakan dan praktik sosial kita.

Kesadaran praktis merupakan kunci untuk meinahami proses bagaimana tindakan dan praktik sosiai kita lambat lawn menjadi struktur, dan bagannana struktur itu mengekang serta meinamptikan tindakan / praktik sosial kita. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi. Demikian pula arus baliknya, yaitu struktur sebagai hasil sedimensi terulang praktik sosial.

Reproduksi struktur KKN di Indonesia salah satunya terbentuk dari kebiasaan kita memberi uang pelicin bagi setiap urusan yang berhadapan dengan rumitnya birokrasi sehingga terjadi adagium "untuk apa dipermudah jika bisa dipersulit". Reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial seperti itu. Secara sederbana, teori strukturasi Giddens antara lain menyebutkan bahwa hidup sehari-hari manusia itu diikat oleh reproduksi lembaga-lembaga sosial, yang dalam perjalanannya bila tidak pernah digugat bisa cepat berubah menjadi sebuah tingkah laku rutin. Tingkah laku itu bisa positif tetapi bisa juga negative. Terhadap tingkah laku itulah, individu harus selalu memperbarui kontrak sosialnya.

Untuk terlibat dalam praktik-praktik sosial, seorang pelaku harus mengetahui apa yamg harus ia lakukan. Giddens menegaskan bahwa mengetahui bagaimana berpartisipasi atau bagaimana bertindak dalam konteks kehidupan sosial juga mencakup pengetahuan tentang bagaimana mematuhi peraturan (*rule)*. Pada dasarnya ini merupakan pengetahuan praktis. Giddens berpendapat bahwa pengetahuan demikian itu merupakan indikasi adanya kesadaran praktis yang bisa dibedakan dari kesadaran diskursif maupun ketidak-sadaran. Partisipasi pelaku dalam praktik-praktik sosial yang berlandaskan pengetahuan bagaimana mematuhi peraturan adalah apa yang disebut Giddens sebagai hakikat rekursif kehidupan sosial. Giddens sadar bahwa penjelasan mengenai kehidupan sosial dari segi peraturan-peraturan merupakan penjelasan kontroversal dan kosekuensinya, ia menempuh banyak kesulitan untuk menerangkan bagaimana ia menerapkan gagasan tentang peraturan itu. Peraturan bukanlah soal

rumusan yang terisolasi atau yang dapat didefinisikan berdasarkan ciri khasnya sendiri. Bagi Giddens peraturan lebih merupakan pembangkit, atau media bagi praktik-praktik sosial, tetapi peraturan tersebut bukanlah suatu yang terpisah dari praktik-praktik sosial itu. Disamping itu tidak ada korelasi yang betul-betul sejajar antara "suatu peraturan" dan "suatu praktik-praktik sosial" dijalankan dalam konteks serangkaian peraturan yang saling terkait dan bertumpang tindih.

Namun itu tidak berarti bahwa yang terjadi hanyalah reproduksi sosial tanpa ada perubahan. Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan itu. "Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah lentur dan tipis, tidak seperti antara kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar". Dengan meminjam gagasan Erving Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas din *(reflexive monitoring of conduct).* Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung 'de-rutinitasi'. De-rutinisasi menyangkut gejala dimana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru. Gerakan anti-korupsi yang sekarang menggejala sebagai gerakan sosial adalah proses de-rutinisasi terhadap praktik-praktik korupsi yang sudah begitu massif di Indonesia. Korupsi adalah rutinitas sosial yang harus dibongkar dan ditinggalkan, harus diderutinasi. Apa yang kemudian terjadi adalah ke-usang-an struktur. Perubahan

struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Akhirnya dengan meminjam istilah Galtung, masyarakat Indonesia yang bebas-korupsi bukanlah sebuah *dystopia* lagi melainkan sebuah "Utopia-relevan".

DAFTAR PUSTAKA

Aberd George dan Davoodi, Hamid (2000). *Coruption Structural Reform and Economic Performens in the Transition Economis.* IMF Working Paper 00/132.

Adi Susilo, Taufik. 2008, China Connection, Yogyakarta, Garasi.

Alatas, Syed Husein, 1987, *Korupsi : Sifat, Sebab Dan Fungsi,* Jakarta, LP3ES.

Assegaf, Ibrahim Sjarief, et.al (2002), *Potret Buram Pemberantasan Korupsi. Dalam Basyaib, Hamid; Holloway, Richard dan Makarim, Nono Anwar (Eds), Mencuri Uang Rakyat, Buku I. Dari Puncak Sampai Dasar'.* Jakarta: Yayasan Aksara.

Adisusilo, Taufik, 2008, *China Connection,* Yogyakarta, Garasi.

Bosu, Benediktus, *Menuju Indonesia Barii: Startegi Pemberantasan Tindak Didana Korupsi.* Malang: Banyumedia, 2004.

Blum, Jack, et.al (1998), *'Financial Havens, Banking Secrecy And Money Laundring'.* Isu 8, Seri UN Office For Drug Control And Crime Prevention (UNDCP) Technical.

Hamid, Edy Suandi, dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia.* Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Irwan, Alexander, 2003, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Gerakan Budaya,* Dalam Wacana, XIV/2003, Yogyakarta.

Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Lubis, Mochtar. dan James C. Scott (ed.), *Bunga Rampai Korupsi.* Jakarta: LP3ES, 1995.

Erika Pegawai Negeri: Bunga Rampai Karangan-karangan. Jakarta:

Bhratara Karya Aksara, 1997.

. *Mafia dan Korupsi Birokratis.* Jakarta: Yayasan Obor, 1987.

Leite, Carlos dan Weidman, Jens (1999), *Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption and Economic Growth'* IMF Working Paper 99/85.

Mauro. Paulo (1996), *'Corruption and Composition of Government Expenditure'.* IMF Working Paper 96/98. Juga Diterbitkan Dalam Jurnal Ekonomi Publik, No. 69/June 1999.

Morgan, Amanda L (1998), *Corruption: Causes, Consequences, And Policy Implication (A Theoritical Review).* World Bank Working Paper.

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional.* Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Suryadinata, Leo, 1994, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa,* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Wiriaatmadja. Rochiati, Dasuki dan Dadan Wildan, 2003, *Sejarah Peradaban Cina,* Bandung, Humaniora.

B.SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

I.PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah, sebagai usaha akademis untuk menjawab permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1.Bagaimanakah linkage agen-struktur saling mengandaikan dalam memberi kontribusi bagi terjadinya praktik-praktik korupsi di Indonesia dalam lingkup kapitalisme di Indonesia.

2.Praktik-praktik korupsi macam apakah yang dominant dilakukan dalam model kapitalisme yang dianggap khas dalam dunia usaha kaum peranakan atau Cina perantauan di Indonesia.

3.Modal social dan modal budaya macam apakah yang menjadi penopang berjalannya kapitalisme kaum peranakan di Indonesia yang membangun dan mengkonstruksi `bangunan korupsi' sehingga begitu massif di Indonesia.

Sehingga hasil penelitian ini diharapkan akan:

1.Menyumbang dan melengkapi wacana (akademis) tentang korupsi. Jika selama ini korupsi lebih sering dikaitkan dengan birokrasi dan sebagian budaya local-tradisional, maim penelitian ini melengkapinya dengan korupsi (yang dipahami dan mungkin dilakukan) oleh dan dalam komunitas etnik Cina; yang nota bene sebagian besar anggota komunitas ini berkecimpung di dunia usaha dan perdagangan.

2.Menjadi modal pengetahuan bagi para praktisi yang berhubungan dengan upaya-upaya anti-korupsi, sehingga dengan demikian memberikan tambahan perspektif dan analisis yang lebih luas (ekstensif), tidak saja bagi pendidikan anti-korupsi yang tengah dikembangkan di Indonesia, tempi juga bacli lembaga-lembaga pemerintah maupun LSM terkait.

3. Sebagai bagian dari upaya melakukan re-konstruksi social dalam jangka panjang menuju masyarakat yang bebas korupsi dalam jangka panjang.

II. INOVASI IPTEK

Selama ini terlanjur terdapat persepsi yang salah dalam memandang fenomena korupsi di Indonesia, yakni: ***Pertama,*** anggapan bahwa seolah-olah fenomena korupsi adalah semata-mata perkara

hukum, padahal fenomena korupsi di Indonesia yang sudah begitu berurat-berakar adalah pertama-tama perkara sosiologis sehingga penyelesaiannya haruslah didekati secara sosiologis.

Kedua, bahwa korupsi adalah warisan budaya lama (utamanya Jawa) yang mengalami enkulturasi dari generasi ke generasi, padahal yang benar adalah bahwa korupsi bukanlah warisan budaya. Masyarakat Indonesia 'mengadopsi' perilaku koruptif adalah semenjak mengenal system birokrasi modern yang dibawa oleh kolonial Belanda (VOC) yang menegaskan pemisahan hak privat dengan hak publik.

Ketiga, karena anggapan di atas, yang lebih disorot sebagai actor pelaku korupsi adalah masyarakat pribumi utamanya yang termasuk dalam pegawai birokrasi pemerintahan. Padahal korupsi juga menggurita di dunia bisnis; sementara dunia bisnis di Indonesia yang menyangkut produksi dan distribusi barang-barang komoditas dan jasa ditengarai lebih dari 70 % dari total asset nasional dikuasai oleh swasta, dengan dominasi kaum Cina peranakan Indonesia yang memang selama berabad-abad lalu menguasai bidang tersebut. Sementara kaum Cina peranakan ini — sama dengan beratus etnik-etnik lain di Indonesia - membawa kultur berikut system-nilai dan etos social yang dalam pergaulan sosialnya akan dipraktikkan dan saling mempengaruhi.

Keempat, dalam pemberantasan korusi selama ini terjadi saling silang untuk mendahulukan salah satu aspek, yakni manusianya (agen) ataukah sistemnya (struktur) yang lebih dulu hams diperbaiki. Pada galibnya kedua aspek tersebut saling berkelindan secara simultan dalam menciptakan kondisi-kondisi sosial yang rentan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini hendak mengkaji sisi-sisi yang disebut di atas, dan berhipotesis bahwa mengguritanya korupsi di Indonesia — kususnya yang berhubungan dengan perdagangan, tender proyek-proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan masyarakat, termasuk lembaga perijinan sama sekali tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kuatnya pengaruh kaum Cina peranakan sepanjang sejarah bangsa Indonesia sejak masa colonial hingga pasca reformasi sekarang. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil tema yang berkaitan dengan kapitalisme yang dipraktikkan oleh kaum Cina peranakan, juga atas dasar kerangka teoritik yang iidak memisahkan agen yang menciptakan kultur dengan struktur yang membingkai perilaku social dalam hubimgan social yang iebih benar.

III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN

Korupsi dan pemberantasannya selama ini selalu berkonotasi kepada pegawai negeri dan birokrasi pemerintah, khususnya bidang pelayanan. Meskipun stigmatisasi tersebut tidak keliru, tetapi tidak benar secara *in it self* Karena pada dasarnya korupsi ivaa terjadi di luar profesi pegawai negeri, karena siapapun orang dengan berbagai profesinya bisa melakukan praktik korupsi; serta korupsi juga banyak terjadi di luar birokrasi pemerintahan. Artinya pengertian, pemaknaan, kajian dan ruang lingkup pemberantasan korupsi harus dsiperbaharui secara komprehensif.

Salah satu wilayah yang hampir tak tersentuh dalam diskursus tentang korupsi dan pemberantasannya adalah dunia perdagangan di Indonesia yang subyek atau person-person yang dominan di bidang tersebut adalah berasal dari komunitas Cina peranakan (Cina yang dibesarkan di Indonesia) atau Cina perantauan (lebih merujuk pada pensikapan komunitas Cina yang lebih merasa dirinya sebagai orang asing di negeri ini). Dalam dunia kapitalisme (perdagangan dan industri) di Indonesia, mereka mengembangkan praktik, kiat, strategi yang pada dasarnya berbeda dengan yang dilakukan dalam model kapitalisme Barat, dimana jika dalam kapitalisme Barat *fair competition* menjadi landasan dalam persaingan dagang sedangkan dalam kapitalisme kaum peranakan lebih mengandalkan prinsip-prinsip yang cenderung kolutif.

Dengan demikian sebuah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan tinggal sebagai 'wacana' jika upaya tersebut tidak melihat aspek keberadaan masyarakat Cina di Indonesia dan berbagai etos sosial mereka yang dikembangkan (terlanjur berkembang) dalam hubungan-hubungan ekonomi dan politik Indonesia. Dengan kata lain membicarakan korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena kapitalisme perkoncoan yang telah menjadi mainstream; selanjutnya menaanalisis kapitalisme perkoncoan tersebut secara niscaya akan menyangkut etos kerja kapitalisme komunitas Cina di Indonesia berikut sistem nilai kultural yang terlekat di dalamnya. Penelitian ini ingin menyingkap tabir tersebut dan membongkar tabu-tabu atas nama SARA, dan meletakkan persoalan hubungan Cina-Kapitalisme Korupsi pada kerangka akademis yang seharusnya.

CURRICULUM VITAE

EDY HERRY PRYHANTORO, Drs. MSi.
(Edyherry)

A. DATA PRIMER

1. Nama Lengkap : **Drs. Edy Herry Pryhantoro, MSi.**

2. Pekerjaan utama : Dosen Pascasarjana Program Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya
Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

3. Pendidikan : S-3 Program Doktoral / Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya (Rencana Disertasi tentang 'Gerakan Anti Korupsi di Indonesia')

S-2 Magister Sosiologi / Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Lulus dengan IP: 3,82 dan predikat Sangat Memuaskan, dengan Tesis tentang 'Paradox Modernitas dalam Pembangunan

S-1 Jurusan Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Lulus dengan IP: 3,32 dengan predikat Cum Laude, dengan Skripsi tentang 'Fenomenologi Sebagai Metode')

4. Kegiatan Lain

Direktur **Pusat Kajian Transformasi Sosial (PsaTS)** / *Center for Social Transformation Studies (CeSoTS)* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga, (2006-2008)

Koordinator **Forum Kajian Anti-Korupsi (ForKAK)** Universitas Airlangga (2007-Sekarang)

Direktur **'Wong-I Institute'**. Sebuah lembaga pengkajian strategis Pemberdayaan dan Pencerdasan Politik dibawah Perhimpunan Masyarakat Independen 'Wong I' Jawa Timur, (2008-Sekarang)

Person In Charge (PIC) **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** untuk Universitas Airlangga, (2008-Sekarang)

Koordinator Penelitian untuk Wilayah Jawa Timur pada **Puslitbang & Info Badan Narkotika Nasional (BNN)**, (2005-Sekarang).

5. Bidang Kajian Utama : ***Anti-Corruption and Good Governance***

   Kuliah yang dikelola : **- Sosiologi Korupsi**
   - Studi Pembangunan
   - Teori Sosial Klasik dan Modern
   - Perubahan Sosial
   - *Cultural Studies*

6. Tempat/tanggal Lahir : Wonosobo, Jawa Tengah / 13 Maret 1964

7. Alamat Kantor : **Departemen Sosiologi FISIP-UNAIR**
   Jln. Airlangga 4-6 Surabaya, Jawa Timur.
   Telp. 62.31.5034015 / Fax. 62.31.5022492

   PsaTS / CeSoTS – LPPM UNAIR
   Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur
   Telp. 62.31.5995247 / Fax. 62.31.5995246

8. a. Alamat Rumah/Surat : Hedona Regency, Blok A2 – 21 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Telp. 62.31.70060036 / HP:62.31.8165430396)
   b. Alamat *e-mail* :Eddyherry_unair@yahoo.co.id

B. PRESTASI DAN PENGALAMAN BERORGANISASI

1. **Dosen Berprestasi** Universitas Airlangga (2004)
2. **Juara I Tingkat Nasional LKIP (Lomba Karya Inovatif Produktif)** Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, di Jakarta (1987)
3. **Mahasiswa Teladan I** Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (1988)
4. **Redaktur** Jurnal 'DIALOGIKA' Fakultas Filsafat UGM (1986-1988)
5. Aktivis **Gerakan Mahasiswa Pro-Demokrasi** a/l: Gerakan Mahasiswa Anti Kekerasan, Advokasi Kasus Kedungombo dll. (1986-1990)
6. Anggota **FKDMI** (Forum Kerja dan Diskusi Mahasiswa Indonesia / 1989-1990)

7. Koordinator Forum '**Diskusi Reboan**' Dosen FISIP UNAIR (1992-1993)

8. Asisten Direktur Operasional pada **Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)** FISIP UNAIR (1994-1996)

9. Koordinator **Forum Mahasiswa Pascasarjana UGM untuk Gerakan Reformasi** (1998)

10. Anggota **Forum Diskusi Kaum Intelektual dan Buruh** (diselenggarakan oleh Perkumpulan DEMOS, TURC, dan Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia / KASBI), Jakarta, 2006

11. Aktivis **Syarekat Dosen Progresif** (2007-Sekarang)

12. Aktivis **Perhimpunan Masyarakat Independen 'Wong-I'** untuk pencerdasan politik rakyat. (2008-Sekarang)

C. RIWAYAT KEGIATAN PENELITIAN

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Biaya	Keterangan
1	Pengaruh Konsumtivisme Terhadap Pola Pikir Dan Kehidupan Mahasiswa Di Yogyakarta	1998	LIPI & Dirjen DIKTI	Juara I tingkat nasional Lomba Karya Inovatif-Produktif (LKIP)
2	Tingkat Pendidikan Wanita Pekerja Sektor *Informal* Dan Determinasinya Terhadap Pengembangan Masa Depan Anaknya	1992	Lemlit UNAIR	Ketua Peneliti
3	Pola Perilaku Remaja Berlalu Lintas Di Kodya Surabaya	1993	Lemlit UNAIR	Anggota
4	Strategi Adaptasi *Sosial Budaya* Para Istri Pegawai Negeri Gol I dan II Terhadap Tuntutan Hidup di Kota Besar	1994	Lemlit UNAIR	Ketua Peneliti

5	Gejala Inkapsulasi Sebagai Mekanisme Survival PK-5 Etnik Madura Di Surabaya	1996	Toyota Foundation	Peneliti Tunggal
6	Penyusunan pola dasar dan strategi pembangunan 5 Tahunan 1995-2000 Kodya Surabaya	1996	Bapeda Kodya Surabaya	Anggota
7	Gaya Hidup Kota Dan Etos Kerja Profesional Muda Di Surabaya	1996	Dirjen DIKTI	Ketua Peneliti
8	Pola Aliansi Buruh Dan Mahasiswa Dalam Berbagai Aksi Mogok Dan Unjuk Rasa Di Jawa Timur	1997	Toyota Foundation	Anggota
9	Pergeseran Makna Solidaritas Sosial di Pemukiman Elite Darmo Satelit Town Surabaya	1997	Lemlit UNAIR	Anggota
10	Jurnalisme Gender, *Kebijakan Redaksional* Surat Kabar Di JATIM	1999	DP3M	Ketua Peneliti
11	Community Enterprises Sebagai Alternatif Membangkitkakan Ekonomi Kerakyatan	2000	DP3M	Ketua Peneliti
12	Paradox Modernitas Dalam Kapitalisme Orde Baru	2002	Dirjen DIKTI	Peneliti Tunggal
13	Irasionalitas Dalam Modernisasi : Studi Tentang Dampak Pembangunan Dalam Perspektif Teori Kritis	2003	DP3M	Peneliti Tunggal

14	Budaya Kekerasan Pada Anggota Reserse Polwiltabes Surabaya	2003	Mabes Polri	Anggota
15	Bias Gender Dalam Profesionalitas Pekerja Industri Media Televisi Swasta	2003	DP3M	Peneliti Tunggal
16	Kemauan ex. Pengguna Narkoba Dalam Menjalani Rehabilitasi Medis	2004	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Anggota/Koordinator Wilayah Jawa Timur
17	Mencari Dimensi Kapitalisme (Model Kapitalisme Yang Berwajah Manusiawi) Dalam Pengelolaan Perusahaan Yang Berbasis Komunitas	2004	Dirjen DIKTI	Ketua Peneliti
18	Asosiasi Kedaerahan Etnik Pendatang Di Kota Yang Berbudaya Majemuk	2005	DP3M	Anggota
19	Survey Sistem Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Bahan Aditif Lainnya Serta Prekusor Pada Institusi Pelaksana Pengawasan Di Delapan Propinsi	2005	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Koordinator Wilayah Jawa Timur
20	Memetakan Perilaku Korupsi : Struktur Atau Kultur? Studi Tentang Persepsi Golongan Muda Terpelajar Di 3 Kota Besar	2005	DP3M / Penelitian Hibah Bersaing	Ketua Peneliti
21	Asosiasi Kedaerahan Etnik Pendatang Di Kota Berkebudayaan Dominan	2006	DP2M	Anggota

22	Korupsi Dalam Model Kapitalisme Kaum Peranakan : Analisis Strukturasi Terhadap Kendala-kendala Kultural Gerakan Sosial Anti-Korupsi di Kalangan Pengusaha Cina	2008	DP2M / Penelitian Hibah Bersaing	Ketua Peneliti
23	Penguatan Masyarakat Sipil Indonesia: Kendala Struktural dan Kultural dalam Penguatan Gerakan Sosial Anti-Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kritis Bourdieusian	2009	Penelitian Hibah Kompetitif sesuai Prioritas Nasional tahun 2009	Ketua Peneliti

D. PENULISAN ILMIAH:

SOSIOLOGI KORUPSI: Buku Materi Pokok Sosiologi Korupsi **Universitas Terbuka**, Jakarta, 2008.

DENGAN TRANSPARANSI MELAWAN KORUPSI: Aplikasi Prinsip-prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, makalah seminar Penguatan Pelayanan Publik melalui *Good Governance*, **PsaTS Unair** dan **World Bank Institute**, Surabaya, Juni 2006.

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI BASIS LEGITIMASI PENYELENGGARAAN NEGARA, Kertas Kerja untuk pokakarya *'Indonesia: Strengthening Local Service Delivery Under Decentralization'*, **World Bank Institute**, *Sanur – Bali, May 28-30, 2007*

PARADOKS MODERNITAS DALAM PEMBANGUNANISME: Diskursus ntang Kapitalisme Menjelang Runtuhnya Orde Baru, Artikel, dalam ***SOSIOHUMANIKA***", Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-ilmu Sosial-umaniora Universitas Gadjah Mada, Vol. 15 No. 1 Januari 2002 , ISSN 11-6189.

EMBARUAN METODE FENOMENOLOGI DALAM METODOLOGI ILMU OSIAL, Artikel, dalam "***MOZAIK***", Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas langga, Vol 1 September 2003.

PROBLEMATIKA PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL DALAM TARIK ULUR ANTARA NEGARA DAN PASAR, Artikel, dalam ***"DIALEKTIKA"***, Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Vol. 2 N0. 1 Januari 2006, ISSN: 1858-0890.

TEORI KEBENARAN FENOMENOLOGIS, Artikel, dalam ***"Jurnal Filsafat"*** Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1995.

SUNGAI TEORI: DARI SOSIOLOGI KLASIK HINGGA MODERN, Naskah Buku, sedang dipersiapkan untuk diterbitkan sebagai buku ajar kuliah Teori Sosial Klasik dan Modern pada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, 2008.

FENOMENOLOGI SEBAGAI METODE, Dari Filsafat ke Teori Sosial, Naskah Skripsi S-1 yang sedang di'*update*' dan diperbaiki untuk dicetak sebagai buku ajar, 2008.

PEMASARAN SOSIAL SEBAGAI UJUNG TOMBAK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, Artikel pada Jurnal sosiologi DIALEKTIKA, Vol. 4 N0. 1, January 2009, ISSN 1858-0890.

Edy Herry Pryhantoro, Drs., MSi.
NIP. 132 009 468